



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Balangan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD PK adalah rencana kerja Kabupaten Balangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan lima tahun kedepan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana strategi SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan perencanaan penganggaran berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II RAD PK

Pasal 3

RAD PK merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di Daerah dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan pada pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2022-2026.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Sistematika dokumen RAD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Profil Kemiskinan di Kabupaten Balangan
 - c. BAB III : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan.
 - e. BAB V : Penutup

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PK.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN :

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BALANGAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2022-2026**



DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2022 - 2026



KABUPATEN BALANGAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022-2026 ini merupakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan lima tahun kedepan mengenai kebijakan, strategi, program kegiatan dan target serta sasaran capaiannya.

Dinamika permasalahan kemiskinan menuntut semua pihak haru terus berfikir kreatif dan inovatif untuk menghasilkan metode penanggulangan kemiskinan yang semakin jelas dan terarah sehingga penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Diharapkan RAD ini dapat menjadi bahan dalam penentuan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dimasa yang akan datang

Disadari Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022-2026 ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif untuk kesempurnaannya dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen ini.

Semoga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022-2026 ini bermanfaat bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Balangan.



Parangin, Maret 2022
Bupati Balangan

ttd

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Acuan Kebijakan.....	1
1.2. Pendekatan Kebijakan Nasional	2
1.3. Pokok Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.....	3
BAB II PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BALANGAN	5
2.1. Kondisi Umum Daerah	5
2.2. Aspek Geografi dan Demografi.....	5
2.3. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	7
2.4. Potensi Kawasan Sumber Daya	16
2.5. Wilayah Rawan Bencana.....	20
2.6. Kependudukan	27
2.7. Kondisi Kemiskinan Multidimensi	28
2.8. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan	28
2.9. Dimensi Pendidikan.....	32
2.10. Dimensi Kesehatan	33
BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.....	44
3.1. Pembentukan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan.....	44
3.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD	45
3.3. Keterpaduan Antar Program/Kegiatan.....	46
3.4. Harmonisasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Pusat.....	47
BAB IV RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi.....	6
Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	9
Tabel 2. 3 Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan	15
Tabel 2. 4 Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis	18
Tabel 2. 5 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tahun 2016-2021	21
Tabel 2. 6 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ...	22
Tabel 2. 7 Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan.....	23
Tabel 2. 8 Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Kabupaten Balangan	24
Tabel 2. 9 Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor.....	25
Tabel 2. 10 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan	26
Tabel 2. 11 Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2016-2020.....	26
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) di Kabupaten Balangan.....	32
Tabel 2. 13 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021	33
Tabel 2. 14 Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Geologi Kabupaten Balangan	7
Gambar 2. 2 Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan	7
Gambar 2. 3 Batas Administrasi Kabupaten Balangan	8
Gambar 2. 4 Luas Masing-masing Kecamatan	9
Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Balangan	14
Gambar 2. 6 Persentase Luas Penggunaan lahan 2020	16
Gambar 2. 7 Model Struktur Ruang Kawasan Agropolitan	18
Gambar 2. 8 Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan	24
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk di Kabupaten Balangan	27
Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Tahun 2020	28
Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan	29
Gambar 2. 12 Target dan Capaian Penurunan Kemiskinan dalam RPJMD 2016-2021	29
Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan	30
Gambar 2. 14 PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) ..	30
Gambar 2. 15 Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Menurut	31
Gambar 2. 16 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	32
Gambar 2. 17 Dashboard Kasus Covid-19 di Kabupaten Balangan Periode Desember....	39
Gambar 2. 18 Prevalensi Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Balangan ...	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Acuan Kebijakan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau/mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan selama ini adalah database kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala keluarga) serta keterpaduan program antar OPD dan dengan Dunia Usaha serta masyarakat. Untuk itu penyediaan database yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada dilapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan.

Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang kemudian diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. RAD wajib dibuat oleh setiap daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tiap daerah.

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan dokumen strategi aksi untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD. Dengan

demikian, dokumen RAD selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk memastikan strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka RAD harus dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan akan diintegrasikan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RAD diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan, sehingga strategi dan rencana aksi dan sasaran RAD tidak hanya menjadi gerakan pemerintah daerah tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pelaku pembangunan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RAD akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

1.2. Pendekatan Kebijakan Nasional

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi triple-track problem, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah/provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan/konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Menurut Perpres Nomor 15/2010, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perpres tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mendukung kebijakan nasional, maka di Kabupaten Balangan telah menyusun strategi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan seperti:

1. Meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman bagi KUBE

2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Perbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin.
5. Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal.
7. Memotivasi angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilan.
8. Memberikan motivasi dan meningkatkan kemampuan serta menggali ide produk yang akan dijual.
9. Meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam upaya pemberian modal usaha ringan tanpa agunan.
10. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial berbasis keluarga.
11. Menyediakan informasi tentang keluarga miskin secara lengkap.

Kemudian arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dijabarkan dalam program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan memberikan akses serta penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
3. Program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

1.3. Pokok Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2022–2026 adalah untuk:

1. Membangun konsensus bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan.
2. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).
3. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan lembaga lainnya.
4. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

BAB II

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BALANGAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana laki-laki, perempuan, dan sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi ketidakberdayaan individu maupun kelompok dalam akses untuk memenuhi kebutuhan dasar dan haknya secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik. Kemiskinan bukan terjadi karena suatu persoalan saja, melainkan adanya keterkaitan antara berbagai fokus sehingga pemenuhan kebutuhan dan hak dasar bagi masyarakat miskin memerlukan penanggulangan secara sistemik, terpadu, dan holistik. Melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengubah Perpres 15 Tahun 2010, maka penanggulangan kemiskinan hadir sebagai upaya berkelanjutan dan sinergis dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dalam upaya mendukung masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, dan memperoleh haknya sebagai warga negara.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah otonom baru pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan.

Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen To, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Jenis batuan pada bagian utara formasi Tanjung (Tet) memiliki sebaran sekitar 5%, tersusun atas perselingan antara batu pasir, batu lempung, batu lanau, batu gamping, dan konglomerat aneka bahan. Sedangkan bagian timur sebaran formasi Berai (Tomb) ada di sekitar Gunung Berai Kecamatan Awayan, tersusun oleh batu gamping bersisipan napal dan batu lempung dengan ketebalan lapisan rata-rata 1-6 meter. Formasi Warukin (Tmw) merupakan tutupan dominan yang hampir mencapai 70% tersebar di bagian utara dan timur Paringin, tersusun dengan perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih dan batu bara dengan ketebalan lapisan rata-rata 2 meter. Formasi Dahor tersebar sekitar 15% di bagian tengah dan barat, tersusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit. Endapan Quarter (Qa) tersebar di daerah dataran bagian selatan (Gambar 2.1).

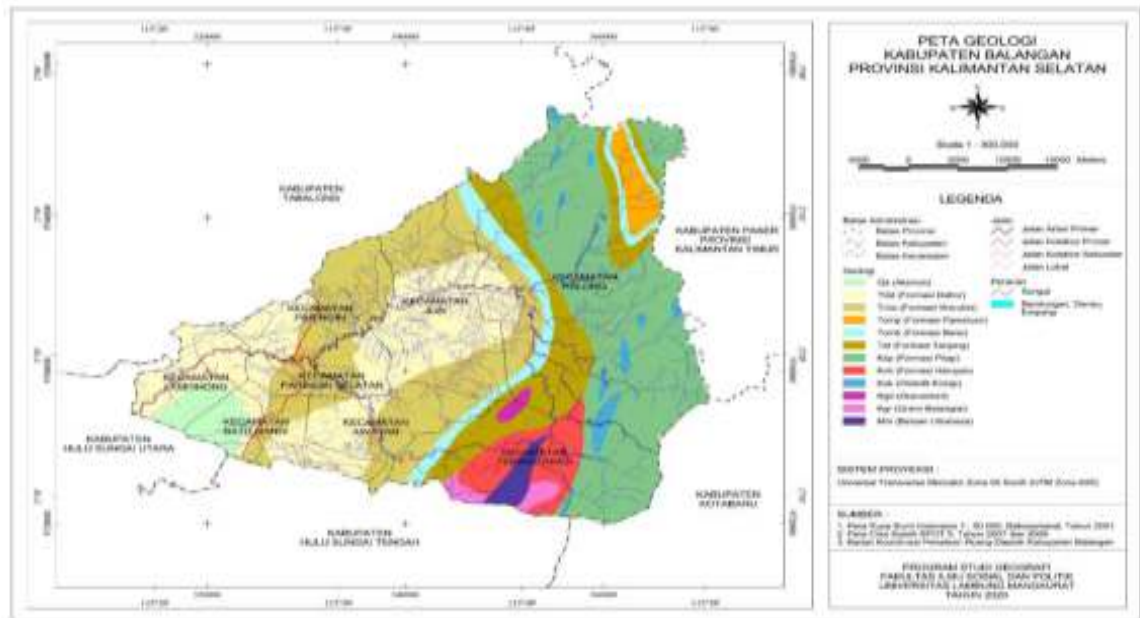
Berdasarkan sebaran satuan geomorfologi pada tiap-tiap wilayah kecamatan, Kecamatan Halong dan Juai tercatat sebagai wilayah kecamatan dengan kondisi geomorfologi yang bervariasi. Sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi geomorfologi dengan satuan perbukitan relatif curam dan pegunungan curam. Wilayah kondisi landau hamper terdapat di setiap kecamatan kecuali Tebing Tinggi. Luas wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan satuan geomorfologi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas Satuan Geomorfologi					
		Dataran (Landai)		Perbukitan (Relatif Curam)		Pegunungan (curam)	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
1.	Halong	12,09	1,90	154,21	33,60	485,99	63,00
2.	Juai	141,71	21,80	150,11	32,80	1,80	0,20
3.	Tebing Tinggi	-	-	66,20	14,40	283,21	36,70
4.	Batu Mandi	181,01	27,90	4,86	1,10	-	-
5.	Awayan	55,32	8,50	67,65	14,80	-	-
6.	Lampihong	70,58	10,90	-	-	-	-
7.	Paringin	126,71	19,50	15,29	3,30	-	-
8.	Paringin Selatan	61,62	9,50	-	-	-	-
	Total	649,01	100	458,30	100	770,99	100

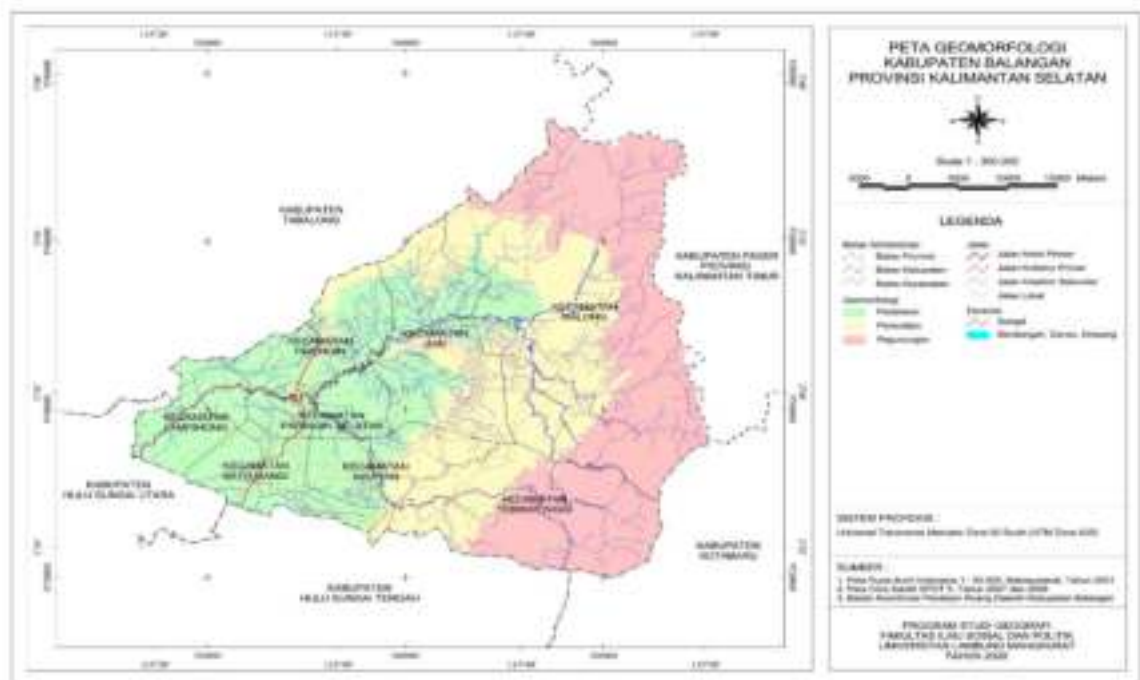
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi

Sumber: SRTM Data V4 (Path 60 Row 13), CIAT-CSI 2008 (Diolah Menggunakan Software Global Mapper 8.0 Dengan Metode Interpolasi Reuter Et Al. (2007); Diolah 2010. Luasan Satuan Geomorfologi Dihitung Menggunakan Piranti Lunak Berbasis GIS, Mapinfo 8.0 SCP. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2016, Kab. Balangan



Gambar 2. 1 Peta Geologi Kabupaten Balangan

Gambar 2. 1
Peta Geologi Kabupaten Balangan



Gambar 2. 2 Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan

2.3. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur. Luas

wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1878,30 km² dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur

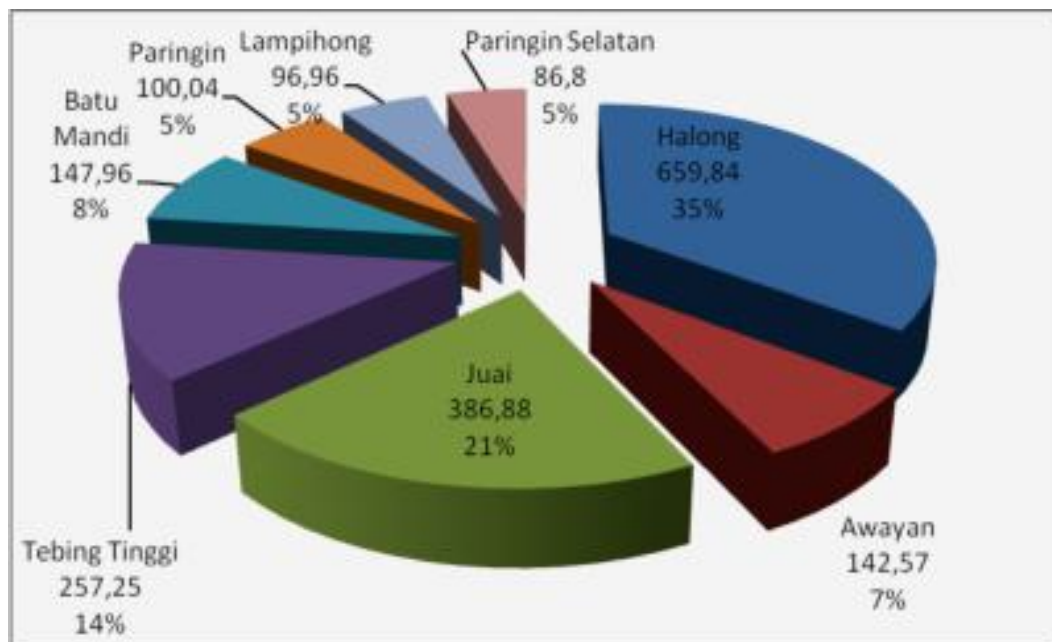
Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no. 23 tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (96,96 km²), Batumandi (147,96 km²), Awayan (142,57 km²), Tebing Tinggi (257,25 km²), Paringin (100,04 km²), Paringin Selatan (86,80 km²), Juai (368,88 km²), seta Halong (659,84 km²).

Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3, 2.4, dan Tabel 2.2 berikut.



Gambar 2. 3 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Gambar 2.4. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²



Gambar 2. 4 Luas Masing-masing Kecamatan

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	21
4	Halong	-	23
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	153

Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2020

B. Kondisi Geografis

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong.

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari daerah pegunungan di sisi Timur dan Utara serta dataran rendah hingga rawa di sisi Barat dan Selatan. Wilayah Kabupaten Balangan dengan dominasi permukaan lahan berupa kawasan hutan yang mencapai 48,11% dari luas wilayah kabupaten atau seluas 90.383 Ha, merupakan potensi besar sebagai kawasan tangkapan air bagi DAS dibawahnya. Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan

absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kabupaten Balangan sebagian besar wilayahnya berada pada kemiringan 0-2 meter, yaitu sebesar 129.693 Ha mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Artinya sebagian besar wilayah Balangan berada pada daerah yang landai.

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Hanya sebesar 29.970 Ha saja yang terletak pada kelas kemiringan di atas 40 meter. Wilayah dengan kelas ketinggian di atas 40 meter ini hanya terdapat pada Kecamatan Halong, dan Awayan (lihat Tabel 2.2). Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Kecamatan Awayan dan Halong, memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

C. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

D. Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

E. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang,

Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdendritik.

1. Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh Sungai Pitap, Sungai Muning, Sungai Lok Batu, Sungai Juuh, Sungai Batumandi, Sungai Jauk, Sungai Pelasan serta Sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

2. Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, pelapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

3. Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan pelapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya.

4. Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada termasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awaysan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

G. Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.

Tabel 2.3
Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

Jenis Penggunaan Lahan (<i>Land Utilization</i>)		Luas (Ha)
1	Tanah Sawah/ <i>Wetland</i>	14.092.12
2	Tanah Bukan Sawah	94.737.12
	a. Kebun Campuran	163.01
	b. Ladang	197.01
	c. Kelapa Sawit	2.755.08
	d. Perkebunan	90.687.01
	e. Kolam	935.01
3	Bukan Lahan Pertanian	73.981.80
	a. Permukiman	2.899.01
	b. Hutan Lahan Kering Sekunder	13.797.4
	c. Hutan Lahan Kering Primer	46.830.01
	d. Rawa	349.01
	e. Semak Belukar	1.71
	f. Lahan Terbuka	305.13
	g. Bendung/Waduk	45.07
	h. Sungai	415.4
	i. Gosong sungai	13.7
	j. Pertambangan	9.314.33
	k. Timbunan Sampah	11.03

Tabel 2. 3 Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, 2021

Gambar 2.6
 Persentase Luas Penggunaan lahan 2020



Gambar 2. 6 Persentase Luas Penggunaan lahan 2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, data dan grafik diolah 2021

2.4. Potensi Kawasan Sumber Daya

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Balangan adalah :

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2020 penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 32 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjangganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

- 1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman hortikultura lainnya.
- 2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Aawayan, *Sawit* dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lambahong dan Batu Mandi dan *Kelapa (Gula Aren)* dengan lokasi prioritas

pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.

- 3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
- 4) Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (58,91%).

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah lokasi obyek wisata alam yang potensial di Kabupaten Balangan adalah sebanyak 9 lokasi terdiri dari 8 lokasi obyek wisata alam dan 1 lokasi obyek wisata religi. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata religi dan wisata budaya. Berikut adalah 10 Objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan dan telah mendapatkan SK Pokdarwis :

Tabel 2.4
Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis

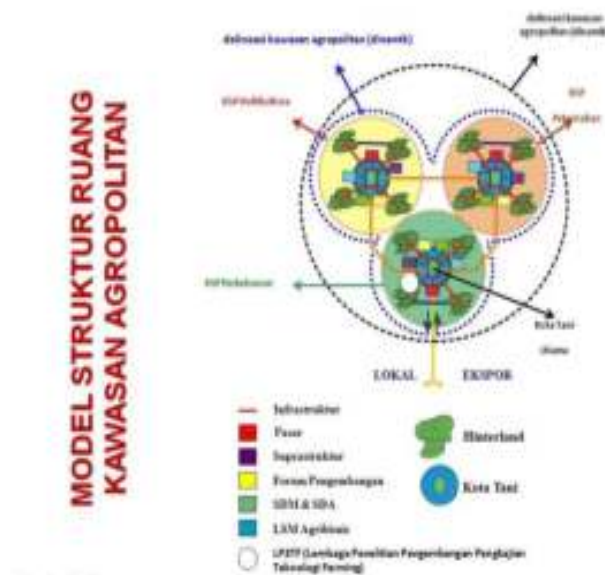
No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Gunung Hawk & Arus Deras Nanai	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua gunung batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan	Desa Kapul, Kecamatan Halong

Tabel 2. 4 Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, 2021

D. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Agropolitan, diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Kabupaten Balangan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan agropolitan adalah Paringin dan Batumandi (lihat Gambar 2.7).



Gambar 2. 7 Model Struktur Ruang Kawasan Agropolitan

1. Kota Tani Utama Paringin

Kota tani utama Paringin dengan desa pusat pertumbuhan Kota Paringin meliputi Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur, Desa Teluk Keramat, Desa Haur Batu dan Desa Gunung Pandau. Kota Paringin sebagai Kota Tani Utama akan berperan sebagai daerah pusat pertumbuhan agribisnis. Kota Paringin sebagai Kota Tani Utama hal ini dikarenakan Kota Paringin memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan, memiliki pasar dengan skala regional. Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:

- a) Pusat perdagangan dan transportasi
- b) Penyedia jasa pendukung pertanian
- c) Pasar konsumen produk non-pertanian
- d) Pusat industri pertanian (agro-based industry)
- e) Penyedia pekerjaan non pertanian
- f) Pusat agropolitan dan *hinterlandnya* terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten

2. Kota Tani

Kawasan Batumandi adalah kota tani dan termasuk dalam kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- a) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan;
- b) Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di wilayah kabupaten Balangan yang juga merupakan bagian dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Sesuai dengan sifat dari Kota Tani yang merupakan pusat dari orientasi kawasan sentra produksi sekitarnya dengan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang lebih lengkap dibandingkan desa-desa yang akan menjadi Kawasan Sentra Produksi (KSP), maka pengembangan Kota Tani berada di Desa Batumandi dan sekitarnya yaitu; (*Desa Timbun Tulang, Desa Teluk Masjid, Desa Bungur, Desa Riwa, Desa Mantimin, Desa Kasai dan Desa Guha*). Pada kawasan ini nantinya diharapkan akan dapat muncul sentra-sentra pengolahan hasil dari komoditi unggulan yang berada di KSP sekitarnya. Untuk itu sarana dan prasarana penunjang akan dikembangkan untuk dapat semakin memperkuat kemampuan kota tani ini untuk menjadi katalisator pertumbuhan dan perkembangan kawasan agropolitan

Sesuai arahan dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Identifikasi Lokasi Agropolitan dari Direktorat Bina Teknik Dirjen Cipta Karya PU tahun 1996 maka batasan dari Kawasan Sentra Produksi (KSP) memiliki deliniasi atau batas kawasan yang bersifat *permeable/plastis/fleksibel*. Artinya batas ini bukan merupakan batas yang mengikuti batas administrasi wilayah. Untuk itu, dalam aplikasi di kegiatan ini akan di bagi kawasan KSP dalam dua sentra yaitu KSP I dan KSP II.

- a) Kawasan Sentra Produksi (KSP) I

Khusus untuk KSP ini secara internal kawasan yang nantinya diharapkan menjadi kawasan lingkaran pertama pengembangan Produksi Komoditi Unggulan adalah *desa Hamparaya, Banua Hanyar, Mampari, Kasai, Pelajau, Munjung, Karuh, Bakung Lok Batum Tarawin dan gunung Manau*.

b) Kawasan Sentra Produksi (KSP) II

Kawasan KSP II ini adalah kawasan produksi komoditi unggulan yang berada di *Kecamatan Halong (pisang talas) dan Kecamatan Juai (labu)*. Pada kedua kawasan KSP ini diharapkan nantinya akan terjadi spesialisasi/pengkhususan pengembangan produk komoditi unggulan, yang kedepan nantinya dapat menjadi bahan baku untuk dapat diolah dan dipasarkan melalui sarana dan prasarana yang ada di Kota Tani Baturandi.

2.5. Wilayah Rawan Bencana

Lokasi Kawasan bencana di Kabupaten Balangan secara umum berada di wilayah Kabupaten Balangan bagian Timur dan tengah tepatnya di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi, Sedangkan potensi rawan bencana lainnya adalah rawan banjir yang berada pada areal sekitar Sungai Balangan dan Sungai Pitap, yakni sekitar Kecamatan Lampihong, Paringin, dan Kecamatan Juai. Berikut merupakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Balangan:

- a) Perkembangan penduduk perlu diawasi dan dikendalikan dan atau menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan cara reboisasi.
- b) Pencegahan terhadap longsor dapat memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor.
- c) Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
- d) Pembuatan *Check Dams* penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah pegunungan.
- e) Membangun sumur resapan di area pemukiman untuk meresapkan air hujan ke tanah.
- f) Melindungi dan meningkatkan fungsi hutan sebagai sarana penyimpanan air.
- g) Menjaga kolam-kolam penampungan dan rawa sebagai penyangga air dan sumber air sungai.
- h) Membangun checkdam di hulu untuk menghambat aliran sediment ke hilir.
- i) Konservasi tumbuhan pada daerah aliran sungai sebagai daerah peresapan air.

1. Kebakaran

Potensi bencana kebakaran biasa disebabkan karena kondisi lingkungan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan jarak antar bangunan yang sangat dekat. Kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran, rata-rata adalah kawasan kumuh yang memiliki kondisi fisik bangunan yang terbuat dari kayu, serta memiliki jarak antar bangunan yang sangat rapat. Kebakaran terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Bencana kebakaran di Kabupaten Balangan tercatat dalam Kabupaten Balangan dalam angka memiliki rata-rata frekuensi terjadi bencana kebakaran dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 107 kali. Frekuensi kebakaran paling

tinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 29 kali (lihat Tabel 2.6). Frekuensi kebakaran dari Tahun 2016-2019 semakin meningkat, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kondisi fisik bangunan, dimana perumahan khususnya perumahan perkampungan dan perumahan di kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Balangan masih menggunakan bahan dasar dari kayu. Selain itu juga dari hasil survey lapangan terhadap kawasan kumuh terhadap jarak antar bangunan di Kabupaten Balangan, tercatat sekitar 60% rumah di kawasan kumuh Kabupaten Balangan memiliki jarak antar bangunan berkisar antara 1-2,5 meter dan juga pengaruh cuaca yang sangat dominan atau kemarau Panjang pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 frekuensi kebakaran menurun menjadi hanya 19 kali kejadian, dan pada tahun 2021 frekuensi kebakaran turun lagi dengan jumlah 12 kali kejadian.

Tabel 2.5
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	2 Kali	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	10 Kali
2017	3 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	4 Kali	2 Kali	6 Kali	22 Kali
2018	7 Kali	2 Kali	1 Kali	4 Kali	6 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	27 Kali
2019	4 Kali	6 Kali	-	2 Kali	3 Kali	7 Kali	1 Kali	6 Kali	29 Kali
2020	4 Kali	2 Kali	-	2 Kali	1 kali	2 kali	3 Kali	5 Kali	19 Kali
2021	3 Kali	-	-	2 Kali	-	1 Kali	3 Kali	3 Kali	12 Kali

Tabel 2. 5 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tahun 2016-2021

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2016-2021 data diolah 2021

2. Banjir

Bencana banjir terjadi akibat beberapa faktor, berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Jumlah frekuensi bencana banjir di Kabupaten Balangan dari Tahun 2016-2020 adalah sebanyak 158. Jumlah banjir paling tinggi di Tahun 2017 yaitu sebanyak 87 kali (lihat Tabel 2.7) dimana pada tahun 2017 Kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana Banjir pada tahun 2017 adalah Kecamatan Juai mengalami kejadian bencana banjir sebanyak 38 kali, Kecamatan Halong 22 kali dan kecamatan Lampihong sebanyak 20 kali, dan pada tahun 2021 ada sejumlah 47 kali kejadian banjir yang terdampak di beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Halong dan Juai

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	4 Kali	4 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	-	2 Kali	12 Kali
2017	22 Kali	38 Kali	-	2 Kali	-	3 Kali	2 Kali	20 Kali	87 Kali
2018	5 Kali	4 Kali	-	-	-	2 Kali	-	4 Kali	15 kali

2019	3 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	-	1 Kali	-	13 Kali
2020	2 Kali	10 kali	2 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	3 Kali	5 kali	31 kali
2021	9 kali	8 Kali	4 kali	7 Kali	3 Kali	4 Kali	10 Kali	3 Kali	47 Kali

Tabel 2. 6 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Setelah tahun 2017, potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Balangan cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2018 kejadian banjir sebanyak 15 kali dan di tahun 2019 kejadian banjir turun menjadi 13 kali bahkan ditahun 2019 Kecamatan Paringin dan Kecamatan Lampihong tidak mengalami kejadian bencana banjir, namun di 2020 menaik menjadi 31 kali dan pada tahun 2021 Bencana Banjir meningkat menjadi 47 Kali kejadian. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap. Tingkat potensi banjir di Kabupaten Balangan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni potensi banjir dengan tingkat tinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah (lihat Tabel 2.8). Tingkat potensi banjir yang terdapat di Kabupaten Balangan berada pada kisaran tingkat menengah dan rendah. Potensi banjir menengah terdapat disebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan, Lampihong dan Paringin Selatan. Potensi banjir rendah ada di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin. Kabupaten Balangan tidak ada daerahnya yang memiliki potensi banjir tinggi.

Tabel 2.7
Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Halong	Halong	Binju	Marajai
	Kapul	Binjai Punggal	Karya
	Liyu	Baruh Panyambaran	Palapi
	Bangkal	Malunyuk	Hauwai
	-	Bahan Hilir	Puyun
		Tabuan	
		Mauya	
		Mantuyan	
Juai	Teluk Bayur	Buntu Karau	
	Mungkur Uyam	Ninian	Mungkur Uyam
	Bata	Lalayau	Sirap
	Mihu		Marias
	Galumbang		Pamurus
	Juai		
Tebing Tinggi	-	Langkap	Gunung Batu
	-	Mayanau	Sungsum
		Ju'uh	Simpang Nadung
		Auh	Tebing Tinggi
		Campan	
Awayan	-	Tundakan	Putat Basiun
		Ambakiang	Pasar Awayan
		Badalungga	Pulantan

		Badalungga Hilir	Muara Jaya
		Awayan	Piyait
			Tundakan Hulu
Paringin Selatan	-	Baruh Bahinu Dalam	Murung Abuin
		Tungkap	Bungin
		Tarangan	Kel. Batu Piring
		Kaladan	Murung Sari
			Binjai
			Telaga Purun
			Galumbang
Paringin	-	Paringin Timur	Layap
	-	Hujan Mas	Kalahiyang
	-	Teluk Keramat	Paran
			Lamida Bawah
			Lok Batu
			Babayau
			Kel. Paringin Kota
Batumandi	-	Banua Hanyar	Tariwin
	-	Teluk Mesjid	Lok Batu
	-	Batumandi	Riwa
			Kasai
			Bungur
			Mampari
Lampihong	Mundar	Matang Hanau	Lok Hamawang
		Papuyuan	Tanah Habang Kanan
		Jimamun	Tanah Habang Kiri
		Kusambi Hulu	Kandang Jaya
			Lajar
			Kusambi Hilir
			Simpang tiga
			Sungai Awang
			Teluk Karya
			Hilir Pasar
			Matang Lurus
			Sungai Tabuk
Lampihong			Lampihong Kanan
			Pimping
			Maliau

Tabel 2. 7 Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan

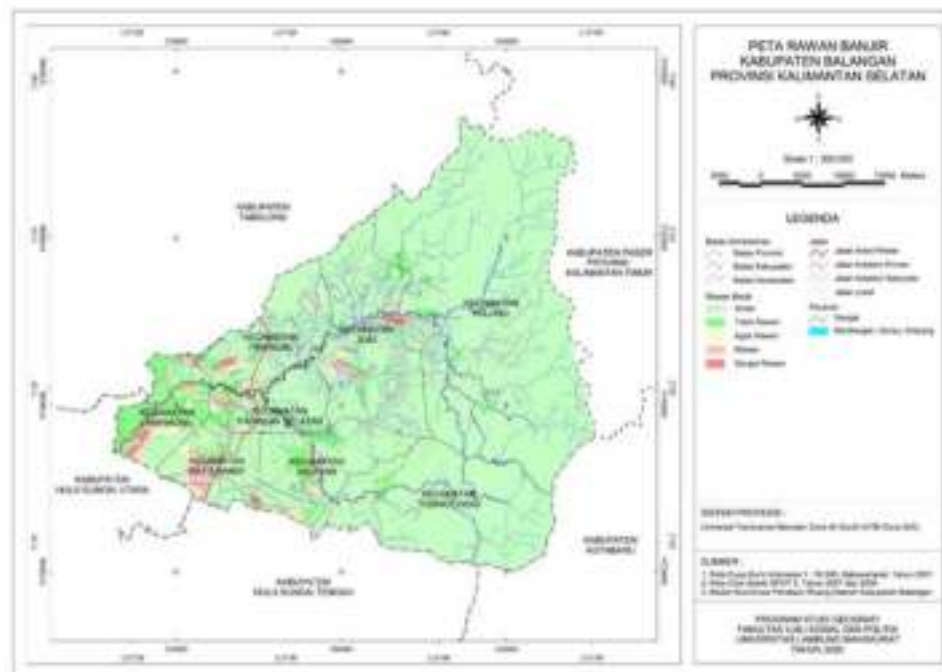
Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sedimentasi. Jumlah desa yang mengalami bencana banjir di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.8
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir
Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Halong	19	3	6	17
Juai	14	5	11	13
Tebing Tinggi	5	1	-	9
Batumandi	7	4	5	7
Awayan	15	1	4	11
Lampihong	9	-	6	20
Paringin	2	2	3	10
Paringin Selatan	1	-	1	11
Total	72	16	36	91

Tabel 2. 8 Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Kabupaten Balangan



Gambar 2. 8 Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan

3. Tanah Longsor/ Tanah Amblas

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25 - 40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018 (lihat Tabel 2.10). Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (mass movement) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendarat dan jatuhnya batuan.

.Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Balangan terjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana tanah amblas hanya di Kecamatan Batumandi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.11). Bencana tanah amblas paling tinggi terjadi pada Tahun 2018. Jumlah kejadian tanah amblas di Kabupaten Balangan dari Tahun 2015-2020 adalah sebanyak 52 kali.

Tabel 2.9
Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor
menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halong	3	-	-	2	4
Juai	-	-	1	-	2
Tebing Tinggi	-	3	2	-	-
Batu Mandi	-	-	-	-	-
Awayan	-	-	-	-	-
Lampihong	1	-	4	3	2
Paringin	-	-	1	1	2
Paringin Selatan	1	-	5	2	-
	5	3	13	8	10

Tabel 2. 9 Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	-	-	-	2 Kali	-	3 Kali	-	-	5 Kali
2017	3 kali	1 Kali	2 Kali	1 kali	-	5 Kali	5 Kali	1 Kali	18 Kali

2018	5 Kali	2 Kali	-	-	-	3 Kali	3 Kali	8 Kali	21 Kali
2019	1 Kali	-	-	-	-	-	3 Kali	4 Kali	8 Kali
2020	3 Kali	1 kali	-	-	-	4 Kali	-	2 Kali	10 kali

Tabel 2. 10 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

4. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim termasuk salah satu jenis bencana di Kabupaten Balangan. Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Balangan terjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Batumandi, Paringin, Paringin Selatan, dan Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana cuaca ekstrim hanya di Kecamatan Tebing Tinggi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.12). Bencana cuaca ekstrim paling tinggi terjadi pada Tahun 2020. Tahun 2017 sama sekali tidak ditemukan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.11

Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	1 Kali	-	1 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	14 Kali
2019	4 Kali	1 Kali	-	1 Kali	5 Kali	3 Kali	8 Kali	4 Kali	26 Kali
2020	2 Kali	-	-	6 Kali	4 Kali	3 Kali	7 Kali	10 kali	32 kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2020

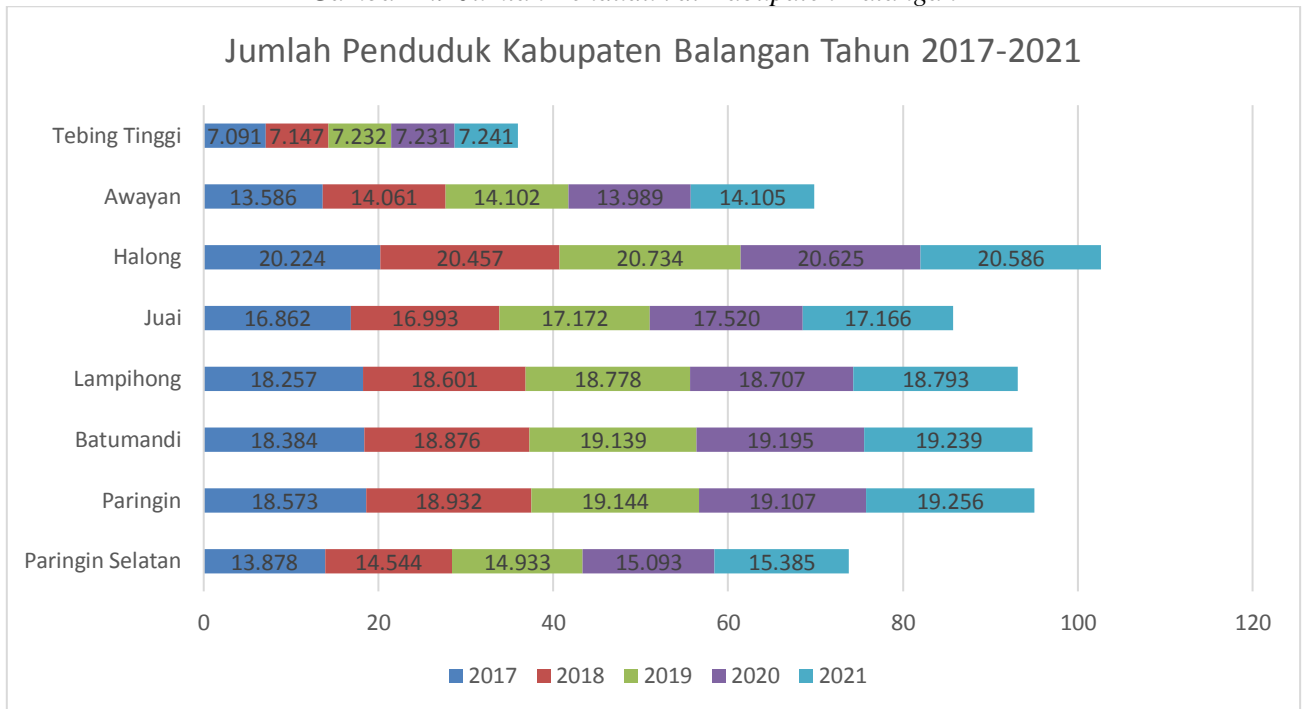
Tabel 2. 11 Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2016-2020

5. Angin Puyuh

Bencana angin puyuh di Kabupaten Balangan selama lima Tahun terakhir teradapat dua kejadian bencana Bencana Angin Puyuh terjadi di Kecamatan Paringin. Kecamatan yang lain relatif lebih aman dari bencana angin puyuh.

2.6. Kependudukan

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk di Kabupaten Balangan



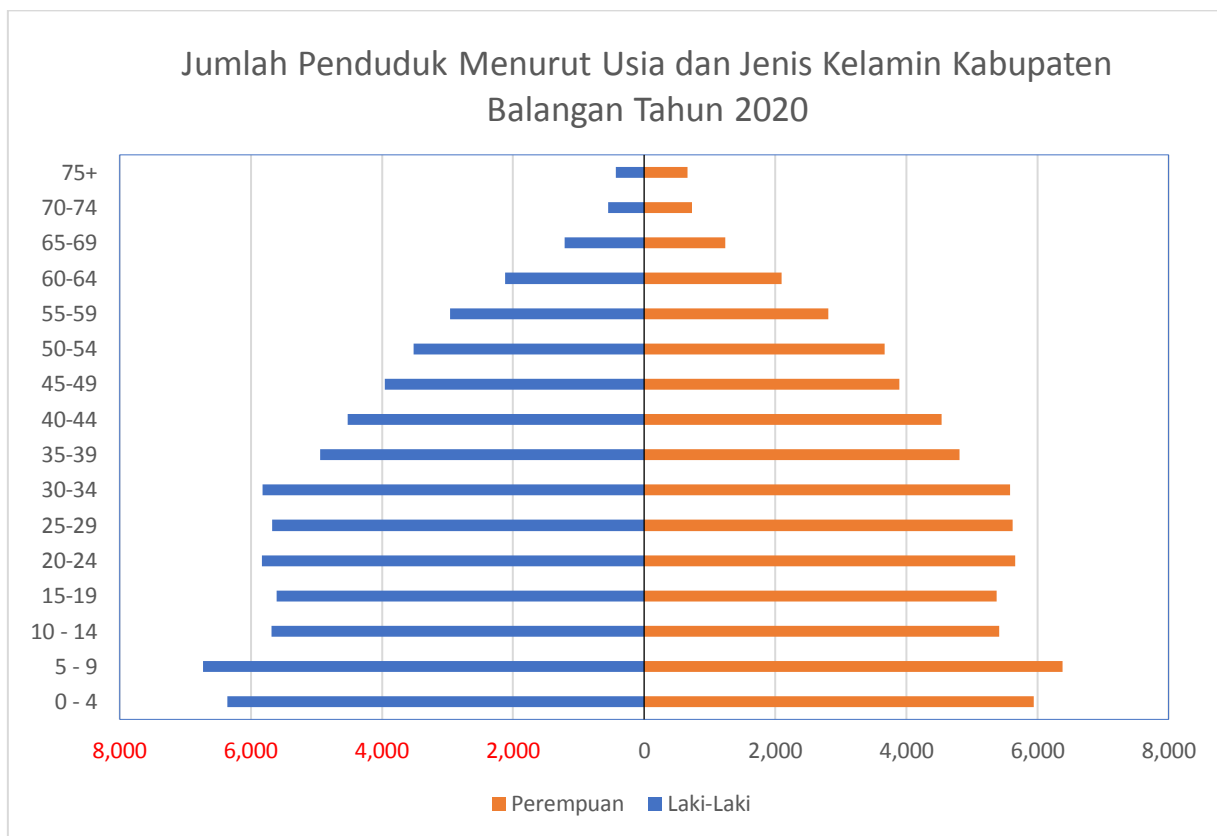
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk di Kabupaten Balangan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan pada tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Halong dengan jumlah desa sebanyak 24 desa disusul Batumandi dan Lampihong. Sementara proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, Kabupaten Balangan diisi mayoritas usia 5-9 tahun (Usia Non Produktif Muda), usia 20-24 tahun dan 30-34 tahun (Usia Produktif). Hal ini sebagai perhatian bagaimana pemerintah mempersiapkan bonus demografi yang akan dihadapi pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin di Kabupaten Balangan, didominasi jenis kelamin laki-laki pada usia belum produktif yaitu usia lima sampai sembilan tahun. Kemudian urutan kedua pada usia 20-24 tahun dan ketiga 30-34 tahun. Hal ini digambarkan dengan piramida penduduk berbentuk ekspansif khas negara berkembang yang memiliki karakteristik sebagian besar penduduk berada pada usia muda dan produktif, sementara penduduk lanjut usia memiliki jumlah lebih sedikit.

Gambar 2.10

Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Balangan Tahun 2020



Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2021

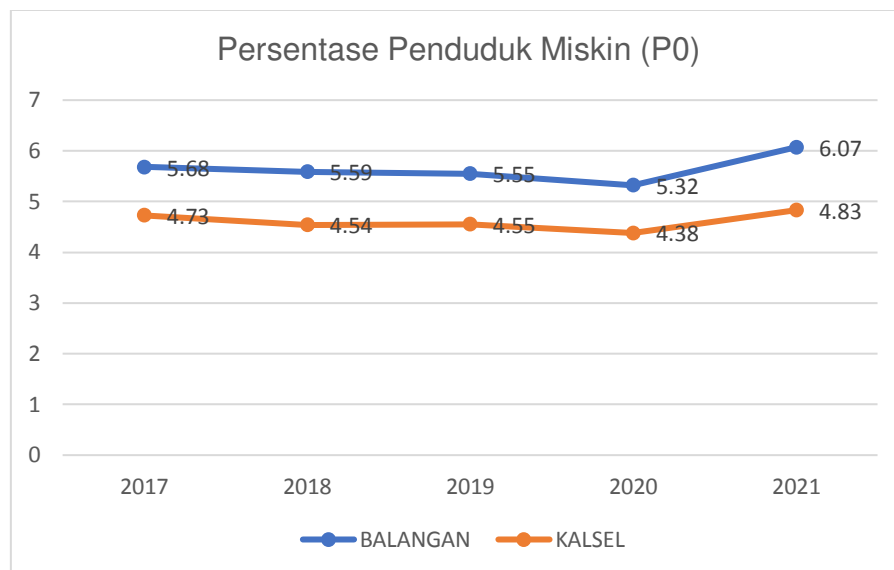
2.7. Kondisi Kemiskinan Multidimensi

Kondisi kemiskinan multidimensi dibawah ini merupakan analisis yang menggambarkan aspek-aspek terkait yang mendukung pencegahan dan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2020.

2.8. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan untuk tahun 2021 berada pada jumlah 6,07 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,32 persen. Angka peningkatan di Kabupaten Balangan sebesar pada tahun 2020 tertinggi nomor empat se Kalimantan Selatan. Dari 5,32 persen meningkat menjadi 6,07 persen dengan jumlah penduduk 7.060 jiwa meningkat menjadi 8. 062 jiwa. Data pada tahun 2021 keluar ketika pencatatan pada tahun 2020 saat pandemi sedang meningkat pergerakannya. Sehingga, meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Pandemi Covid 19 tidak bisa terhindarkan. Dibawah ini adalah grafik angka kemiskinan di Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

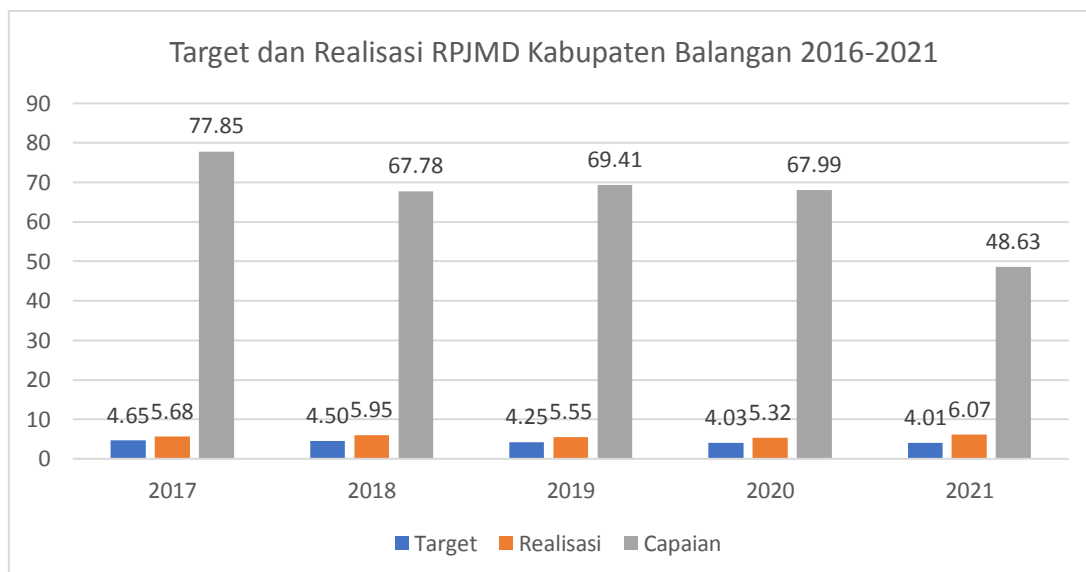


Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Kinerja penurunan angka kemiskinan yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami kondisi fluktuatif namun melihat secara capaian masih tergolong sedang. Kemudian pada tahun 2020-2021 terjadi adanya kondisi penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak kepada refocusing anggaran dan sektor-sektor ekonomi yang lesu. Sehingga pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tajam dan capaian sangat rendah.

Gambar 2.12
Target dan Capaian Penurunan Kemiskinan
Kabupaten Balangan dalam RPJMD 2016-2021



Gambar 2. 12 Target dan Capaian Penurunan Kemiskinan dalam RPJMD 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan dalam lima tahun terakhir, dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini. Pada tahun 2015 sampai 2018 terjadi adanya peningkatan positif. Adapun pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sampai pada point minus dan melambat sebesar -2,47 persen. Minus Kabupaten Balangan dalam pertumbuhan ekonomi lebih besar terhadap Kalimantan Selatan, dan terendah se Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Pandemi Covid 19 sudah mulai berdampak kepada sektor ekonomi sehingga mengalami resesi yang cukup tajam.

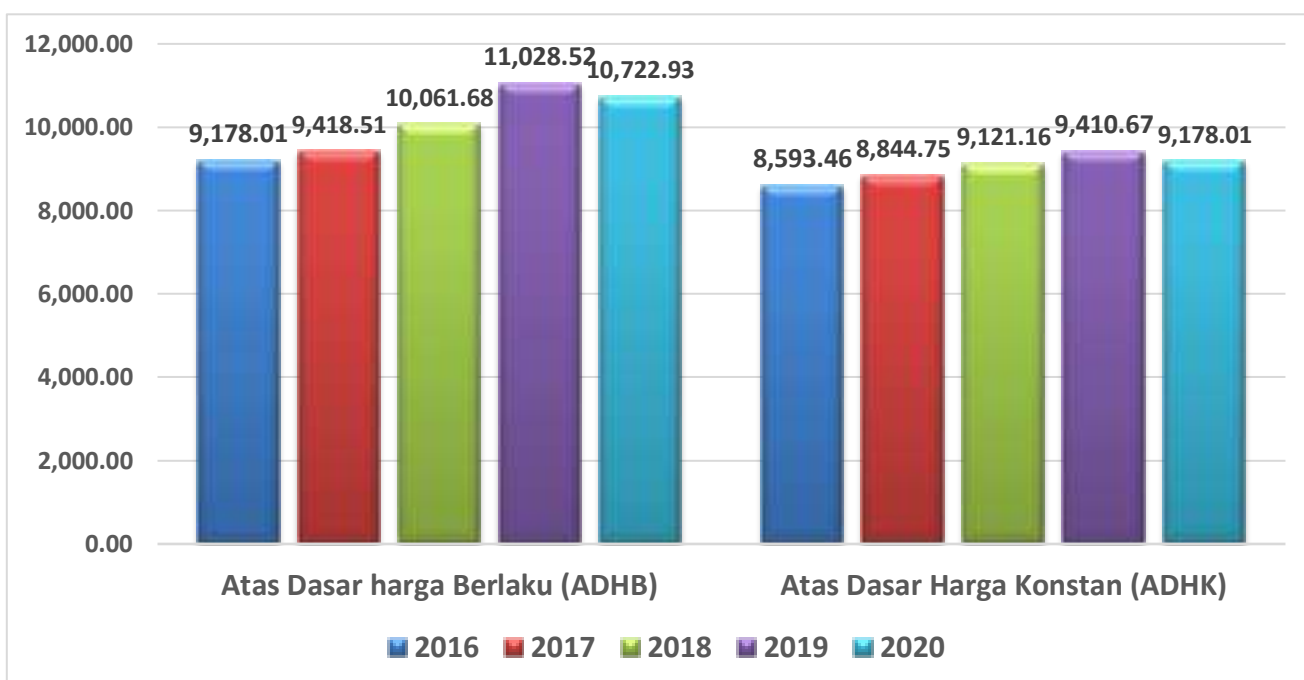
Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan
terhadap Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2019

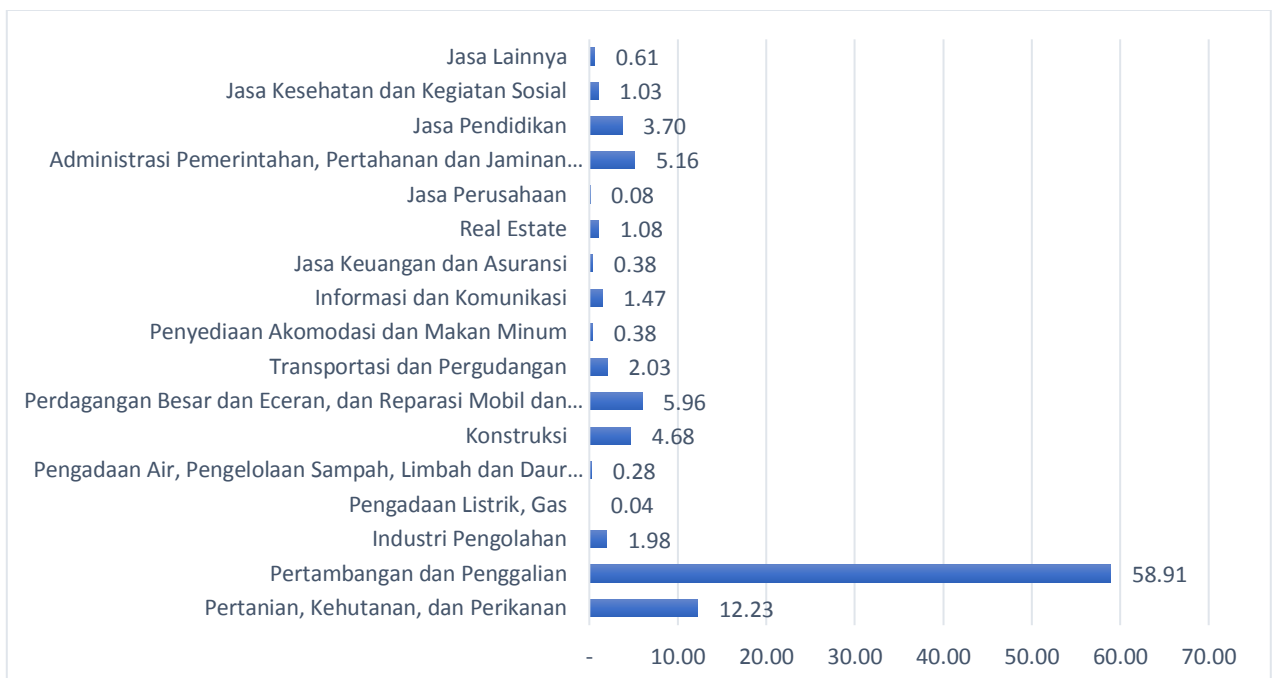
Gambar 2.14
PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)



Gambar 2. 14 PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2020

Gambar 2.15
Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Balangan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020



Gambar 2. 15 Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Menurut

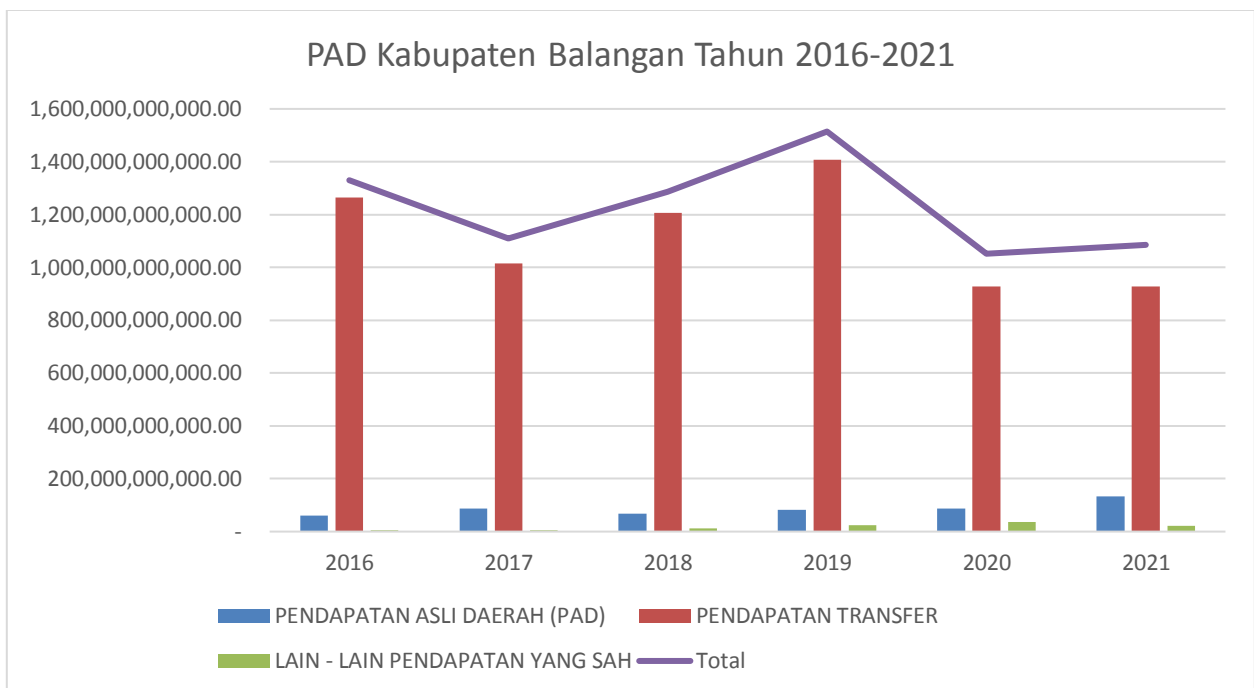
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2021

Pada aspek Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan pada lapangan berusaha Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 10,72 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,31 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,03 triliun rupiah. Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 9,41 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,18 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Balangan mengalami perlambatan ekonomi ekonomi sekitar 0,71 persen. Penurunan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha akibat dampak Pandemi Covid-19.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

*Gambar 2.16
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021*



Gambar 2. 16 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, 2021

Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam menjawab dimensi ekonomi dan sosial, upaya pembangunan sumber daya manusia juga terkait dalam perluasan dan peningkatan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Balangan. Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Balangan pada tabel dibawah ini, tahun 2017 hingga 2020 jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan. Sementara pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 31,16%. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal diantaranya dipengaruhi oleh persyaratan pengalaman kerja belum memadai pada sumber daya manusia (SDM) lingkup Kabupaten Balangan. Kedua, masih rendahnya penguasaan SDM lingkup Kabupaten Balangan terhadap teknologi dan pengaplikasian administrasi perkantoran. Ketiga, fasilitas pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan masih belum memadai dan jenis pelatihan yang belum mengikuti pangsa bursa pencari kerja.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) di Kabupaten Balangan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Balangan	69.496	69.585	65.086	70.928	70.707

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) di Kabupaten Balangan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2021

2.9. Dimensi Pendidikan

Dimensi kemiskinan pada bidang pendidikan dapat dilihat melalui beberapa standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang sekolah dasar, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), dan data anak putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Paket). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio anak sekolah yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang masuk pada usia sekolah pada suatu daerah. APK memberikan gambaran berapa jumlah penduduk yang masuk pada usia sekolah, mengikuti jenjang pendidikan. APM

merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi antara usia penduduk yang sudah masuk pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang sekolah tersebut sesuai dengan tingkat pendidikannya. Berikut dibawah ini merupakan capaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Hambatan pada bidang pendidikan, sebagai dampak pandemi Covid-19 seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui daring. Pada pelaksanaannya masih banyak siswa/siswi yang mengalami hambatan teknis seperti jaringan yang belum memadai, ketimpangan fasilitas, dan tempat tinggal yang aksesnya masih kurang menjangkau. Waktu sekolah daring yang tidak *fulltime* seperti ketika sekolah tatap muka, juga dimanfaatkan siswa/siswi untuk membantu bekerja orangtua. Sehingga ketika sudah dimulai kembali pembelajaran tatap muka, siswa/siswi memerlukan waktu untuk menyesuaikan kembali dengan ritme pembelajaran yang ada. Terjadinya *gap moment* antara pembelajaran daring dengan tatap muka disebut dengan *learning loss*.

Selain munculnya ancaman *learning loss*, tidak optimalnya pembelajaran yang berlangsung selama masa daring juga dipicu adanya ketimpangan akses fasilitas dan kemampuan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran daring. Ketimpangan dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik dapat berpengaruh kepada penurunnya capaian belajar, utamanya pada siswa/siswi yang masuk ke dalam golongan keluarga kurang mampu (miskin). Penurunan capaian belajar dapat mempengaruhi resiko menurunnya kompetensi tenaga kerja dan berkurangnya bonus demografi di Kabupaten Balangan.

2.10. Dimensi Kesehatan

Capaian indikator bidang Kesehatan meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah persalinan yang ditolong nakes, perkembangan covid 19 yaitu capaian vaksinasi di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68	68	70	73,2	79
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,55	74,88	76,43	80,11	88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	79,66	79,3	81,73	85,26	93
4	Pelayanan Kesehatan Balita	52,6	51	61,72	95,13	95
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	82	85	96,03	15,01	18
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	16	15	38	12	21
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41,39	41,3	69,74	93,6	81
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	75	151	29,7	41
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	93	120,28	49	35
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	125	175	173
11	Pelayanan Kesehatan dengan TB	100	100	38	17	17
12	Pelayanan Kesehatan dengan Orang dengan Risiko HIV	100	100	100	87	69

Tabel 2. 13 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 Kelahiran Hidup (KH). Kematian bayi adalah bayi yang mati dan mati dini <28 hari kelahiran. Kematian bayi dibagi menjadi 2, yaitu kematian bayi dini yang terjadi selama minggu pertama kehidupan (0-6 hari) dan kematian bayi lambat yang terjadi 7-28 hari kehidupan. Kematian bayi menurut penyebabnya yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan dan kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal disebabkan oleh faktor faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (Rachmadiani dkk., 2018).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan Tabel diatas, AKB di Kabupaten Balangan tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, dari 7/1.000 KH ditahun 2020 menjadi 13/1.000 KH AKB ditahun 2021 dengan total kematian bayi jika dikonversi ke absolut sebanyak 30 orang, yang antara lain disebabkan oleh Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) sebanyak 17 orang, asfiksia sebanyak 4 orang, sepsis neonatorum 1 orang, pneoumonia 1 orang dan kasus lainnya sebanyak 4 orang. Kematian bayi tersebut terjadi di rumah sebanyak 2 orang, diperjalanan 1 orang dan di RS sebanyak 27 orang (RS tipe C sebanyak 21 orang, tipe B sebanyak 6 orang)

Tingginya kematian bayi tahun 2021 di Kabupaten Balangan salah satu penyebabnya karena masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi yang terkait erat dengan faktor endogen kematian bayi. Ibu hamil resiko tinggi tersebut antara lain ibu hamil dengan anemia sebanyak 464 orang, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 323 orang, ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti TBC, hipertensi maupun lainnya sebanyak 86 orang yang tentunya berdampak terhadap kelahiran bayi dengan BBLR dan asfiksia, yang mana selama tahun 2021 ditemukan kasus BBLR di kabupaten Balangan sebanyak 238 orang dengan kematian BBLR berjumlah 17 orang.

Adanya kematian bayi karena sepsis neonatorum dan pneoumonia menggambarkan masih adanya kematian bayi yang dipengaruhi oleh faktor eksogen yaitu faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar karena masih kurang optimalnya pelayanan bayi baru lahir dan bayi yang sesuai standar. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6

jam) yang meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Sedangkan untuk Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kurang optimalnya pelayanan terhadap bayi baru lahir dan bayi sesuai standar yang diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terus disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tentu dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan dan kehamilan berisiko tinggi, perawatan bayi baru lahir dan bayi yang berisiko tinggi. Selain itu juga dipengaruhi oleh kompetensi bidan di desa maupun di puskesmas serta masih adanya beberapa desa yang tidak ada bidan di desa yang merupakan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir maupun bayi sehingga karena tidak ada bidan di desa tersebut akhirnya ditemukan kematian bayi seperti di Desa Batumandi.

Diketahuinya sebab kematian bayi dari sebelum tahun 2021 hingga tahun 2021 maka Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kematian bayi tersebut. Upaya yang dilakukan selama tahun 2021 antara lain dengan mengintervensi faktor endogen penyebab kematian bayi yaitu memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk seluruh ibu hamil yang mengalami KEK dengan harapan tidak melahirkan BBLR yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian bayi di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir. Selain itu juga memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil sehingga dengan mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai standar maka tidak akan mengalami anemia pada saat kehamilan yang terkait erat dengan faktor endogen serta upaya penanganan yang komprehensif terhadap ibu hamil anemia baik anemia ringan maupun berat.

Seperti disebutkan diatas faktor kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan, maupun perawatan terhadap bayi baru lahir dan bayi yang merupakan pemicu faktor eksogen terhadap kematian bayi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan di tahun 2021 berkoordinasi dengan 12 puskesmas mengadakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, sehingga dengan adanya kelas ibu hamil dan balita tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan untuk ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan, persiapan persalinan serta ibu dan keluarga juga tahun bagaiman perawatan yang benar terhadap bayi baru lahir dan bayi. Walaupun sudah ada kelas ibu hamil dan kelas balita sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga namun tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil dan

kelas balita yang setiap kelasnya/kelompok berjumlah sebanyak 10 orang ibu hamil dan 10 orang ibu balita yang didampingi keluarga pada waktu mengikuti kelas ibu hamil dan kelas balita.

Upaya lain yang dilakukan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi untuk meningkatkan kompetensi bidan dalam mendeteksi komplikasi ibu hamil dan risiko tinggi pada bayi baru lahir maka diadakan Orientasi Neonatal Essential dan pembelajaran kasus kematian BBLR oleh dr Spesialis Anak, pelatihan *Blended Learning* Dokter, pelatihan *Blended Learning* Bidan, dan *Blended Learning* MTBS dan juga melaksanakan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) baik tingkat puskesmas maupun kabupaten. Walaupun sudah dilaksanakan peningkatan kompetensi bidan namun kematian bayi ditahun 2021 tetap ditemukan bahkan meningkat dengan signifikan karena dari seluruh bidan yang ada di kabupaten Balangan hanya sebagian kecil yang mendapatkan pelatihan tersebut.

Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter spesialis anak sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada bayi baru lahir dan bayi yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif, namun masih saja ada ditemukan kematian bayi di RS sebanyak 27 orang, hal ini kemungkinan dipengaruhi seperti yang disebutkan diatas yaitu terkait kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan risiko tinggi dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke RS. Selain itu kematian bayi di RS tentu juga dipengaruhi kelengkapan alat di ruang Perinatologi RSUD Kabupaten Balangan yang masih terbatas dalam menangani bayi dengan komplikasi, sehingga untuk kasus berat yang memerlukan alat yang canggih seperti berat badan bayi lahir yang sangat rendah tidak dapat ditangani dengan komprehensif dan pada akhirnya kematian tidak dapat dihindari.

Berbagai upaya dilakukan selanjutnya pada tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menekan kematian bayi antara lain dengan menggunakan anggaran tambahan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2.761.653.000,- seperti yang disebutkan sebelumnya diatas.

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sementara, AKI atau Maternal Mortality Rate (MMR) menurut batasan dari TheTenth Revision of International Classification of Diseases (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015). Kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung adalah sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas, dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Kematian ibu tidak langsung merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS, dan penyakit kardiovaskular (Saifudin, 2010).

Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah masih banyaknya kasus 3 terlambat. Kasus 3 terlambat, meliputi terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan, terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (GKIA, 2016). Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, AKI tahun 2021 di Kabupaten Balangan terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 89/100.000 Kelahiran Hidup (KH) 2 orang ditahun 2021 menjadi 309/100.000 KH (7 orang) atau terjadi peningkatan sebesar 220/100.000 KH (5 orang). 7 orang kematian ibu tersebut antara lain disebabkan oleh penyebab langsung yaitu 2 orang karena perdarahan, 2 orang karena Pre Eklamsi Berat, 1 orang karena hipertensi dan 1 orang karena penyerta lainnya yaitu dugaan TBC dan 1 orang dugaan preeklamsia yang mana kematiannya terjadi di rumah ibu sebanyak 2 orang, 1 orang di puskesmas dan sebanyak 4 orang di RS. Jika di Bandingkan dengan yang di inginkan standar Sustainable Development Goals (SDGs) AKI di Kabupaten Balangan termasuk penyumbang negatif karena berada dibawah 80/100.000 KH.

Kematian ibu selain penyebab langsung seperti yang disebutkan diatas tentu juga dipengaruhi oleh penyebab tidak langsung yang tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi antara lain ibu hamil dengan anemia sebanyak 464 orang dan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 323 orang, ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti TBC tentunya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, eklamsia baik pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang akhirnya dapat berakibat kematian.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berhak diperoleh setiap ibu hamil baik di pelayanan dasar seperti Poskesdes dan Puskesmas maupun pelayanan rujukan di RS antara lain pemenuhan standar kualitas 10 T yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentase janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus dan temu wicara (konseling), sedangkan SPM yang berhak diperoleh setiap ibu melahirkan yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal pada ibu hamil maupun bersalin pada tabel (Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) juga sangat mempengaruhi terhadap kematian ibu, yang mana pelayanan pada ibu hamil maupun bersalin masih belum 100% seperti yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 79% atau 2.069 ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sebesar 95% atau 9.275 ibu bersalin.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga akan kehamilannya baik normal maupun berisiko tinggi sebagai upaya menekan kematian ibu, sehingga tahun 2021 diadakan kelas ibu hamil sebanyak 58 kelas. 58 kelas ibu hamil tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil yang setiap kelasnya/kelompok sebanyak 10 orang ibu hamil yang didampingi keluarga pada waktu mengikuti kelas ibu hamil. Sedikitnya kelas ibu hamil tersebut berdampak

masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kehamilan dan persalinan yang aman sehingga masih ada ibu yang bersalin di tolong oleh paraji (Bidan kampung) saja tanpa berdampingan dengan bidan di desa walaupun sudah diterbitkan PERDA KIBBLA (Kesehatan Ibu bayi dan Balita) pada tahun 2017 dan berlanjut ke tahun 2021 sebagai upaya untuk menekan kematian ibu sebagai dasar kemitraan bidan dan dukun bayi. Faktor pemberdayaan masyarakat juga salah satu faktor tidak langsung menyebabkan kematian ibu. Cakupan deteksi risiko ibu hamil tahun 2021 sebanyak 833 orang yang terdiri dari cakupan risiko masyarakat 377 atau 14% dan cakupan risiko oleh tenaga kesehatan sebanyak 496 atau 14%. Di lihat dari ke dua cakupan tersebut cakupan deteksi oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dari masyarakat ini menandakan bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum optimal untuk mendeteksi faktor risiko kehamilan yang terjadi pada dirinya dan keluarga serta masyarakat.

Selain faktor diatas juga tentu sangat dipengaruhi oleh keberadaan bidan di desa dan Poskesdes sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak selain puskesmas. Rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 138 buah Poskesdes. Walaupun sudah terpenuhi secara rasio namun jika berdasarkan 1 desa 1 bidan masih belum terpenuhi yaitu dari 154 desa ada 14 desa yang tidak memiliki bidan di desa padahal berdasarkan SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin yang berhak diperoleh setiap ibu melahirkan yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Ketidak adaan bidan di desa diantaranya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong yang pada akhirnya di desa tersebut ditemukan kasus kematian ibu.

Yang tidak kalah penting dari keberadaan bidan di desa tentu kualitas atau kompetensi bidan juga sangat berpengaruh terhadap kejadian kematian ibu. Dalam rangka peningkatan kompetensi bidan maka pada tahun 2021 karena keterbatasan anggaran jadi hanya di adakan Oreintasi Kohort Ibu Bayi dan Balita terintergrasi PPIA, Oreintasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) untuk pelaporan kematian ibu dan bayi, Pelatihan Basic Live Sup (BLS) untuk bidan sebanyak 5 orang, dokter sebanyak 4 orang karena menjadi lokus AKI oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan untuk peningkatan kompetensi seperti pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) dan pelatihan lainnya tidak dapat dilaksanakan padahal pelatihan tersebut sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi bidan di desa maupun bidan koordinator yang ada di 12 puskesmas dalam hal mendeteksi dini kasus risiko dan pertolongan kegawatadaruratan persalinan yang mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sehingga tidak ada lagi kematian ibu di rumah dan puskesmas karena keterlambatan mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi pada ibu yang akhirnya menyebabkan keterlambatan melakukan rujukan ke RS untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif oleh dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi (SPOG).

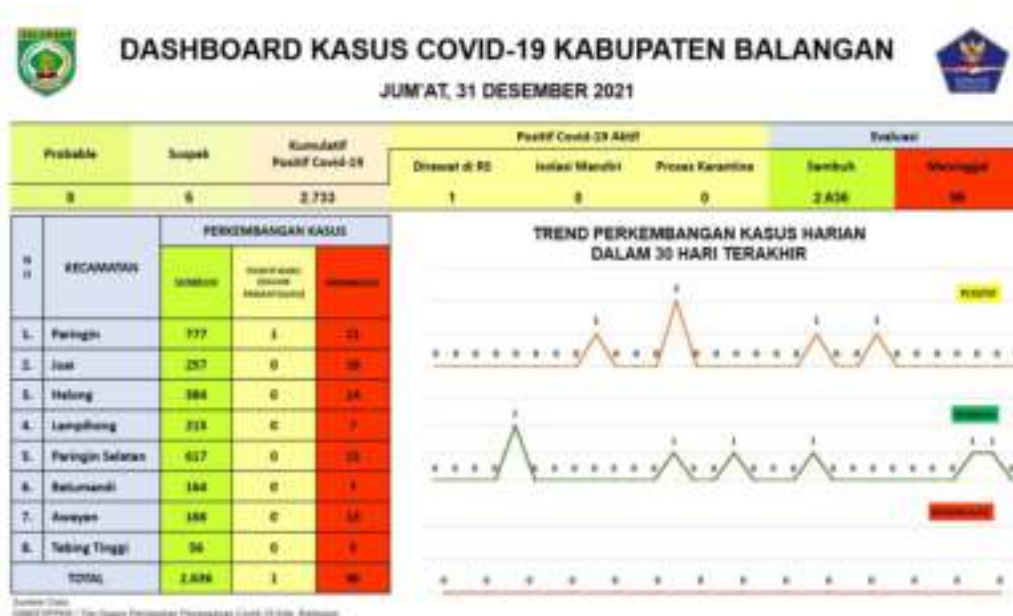
Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi (SPOG) sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu

hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif namun masih saja ada ditemukan kematian ibu di RS sebanyak 4 orang hal ini kemungkinan dipengaruhi seperti yang disebutkan diatas yaitu terkait kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan berencana pada ibu yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain itu juga kemungkinan dipengaruhi oleh keterlambatan penanganan di RS.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menekan kematian ibu kedepannya, khususnya untuk tahun 2022 menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2.029.937.000,- antara lain untuk Puskesmas Halong berupa renovasi/penambahan ruangan puskesmas mampu PONED, set pemeriksaan kesehatan mampu PONED sebanyak 1 paket, 1 set obsgyn, 1 set kegawatdaruratan maternal dan neonatal dan 1 set perawatan pasca persalinan, 1 paket USG 2D digital di Puskesmas Paringin, 1 paket sistem informasi Puskesmas Paringin. Selain dengan anggaran DAK juga melalui APBD II seperti kegiatan yang disebut diatas ditambah membangun Poskesdes Mamigang, renovasi Poskesdes Kedondong, Huawai, Gunung Batu, Binjai Punggal dan Gunung Manau, distribusi USG dari kementerian Kesehatan yang di gunakan untuk skrining faktor risiko pada ibu hamil antara lain puskesmas Puskesmas Paringin Selatan, Tebing Tinggi, Juai, dan Halong serta membayar premi asuransi kesehatan ke BPJS antara lain jaminan tersebut dapat digunakan untuk ibu hamil, ibu bersalin dan nifas agar memeriksakan dirinya dan bersalin ke fasilitas kesehatan.

C. Penanganan Pandemi Covid - 19

Gambar 2.17
Dashboard Kasus Covid-19 di Kabupaten Balangan
Periode Desember 2021



Gambar 2. 17 Dashboard Kasus Covid-19 di Kabupaten Balangan Periode Desember

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

Penanganan virus covid 19 mengupayakan dengan mengejar tingkatan angka vaksinasi. Per Desember 2021, tingkat vaksinasi di Kabupaten Balangan untuk dosis pertama mencapai 82 persen atau 82.170 orang yang sudah divaksin. Dosis kedua sudah mencapai 39 persen atau 39.143 orang yang sudah divaksin, dan jumlah yang belum melaksanakan vaksinasi 18.143. Tingkatan vaksinasi di Kabupaten Balangan mencapai nomor satu tertinggi se Kalimantan Selatan, hal ini diupayakan oleh segenap tim satgas Covid-19 Kabupaten Balangan dengan melaksanakan vaksinasi *door to door*, sosialisasi ke kalangan masyarakat, dan penyebaran gerai vaksinasi di tempat-tempat umum.

D. Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan

Perlu diketahui bahwa penyebab *stunting* antara lain dari faktor gizi yaitu rendahnya asupan makanan bergizi pada anak, kurangnya keragaman menu makanan, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak, sedangkan dari faktor ibu yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan sehingga ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan *Antenatal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), masih kurangnya akses kepada makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi, sedangkan berdasarkan kajian tentang *stunting* yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan yang berkerjasama dengan Poli Teknik Kementerian Kesehatan Banjarmasin pada tahun 2020 di Kabupaten Balangan dengan hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan hasil uji statistik di Kabupaten Balangan ada hubungan antara penyakit infeksi dan kondisi psikologis sebelum hamil dengan status *stunting* ($p < 0,05$) sehingga perlunya intervensi sejak masa remaja agar ibu siap untuk hamil dan mengurangi risiko *stunting*.

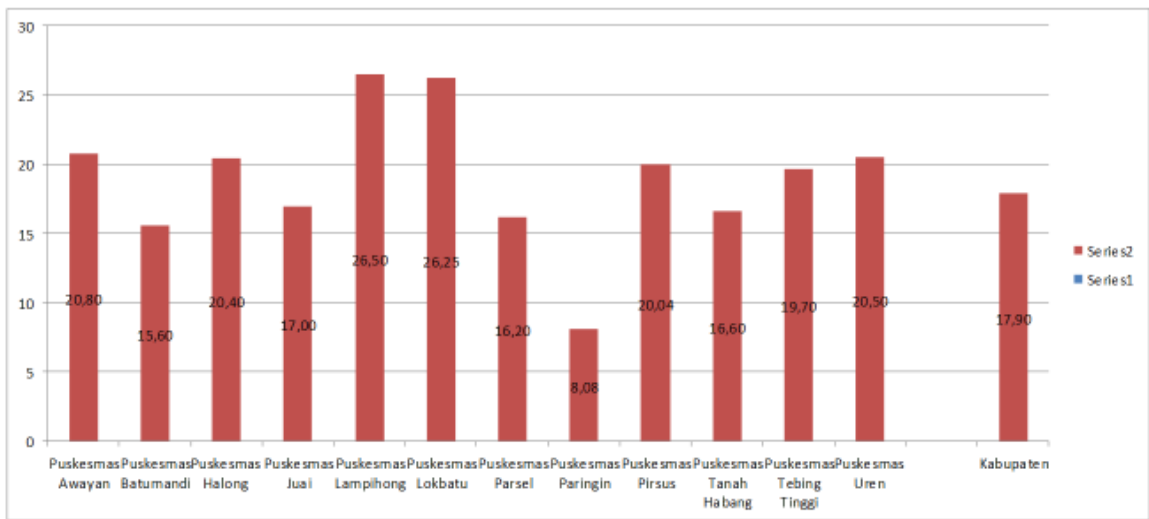
Tabel 2.14
Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan

NO	Jumlah sasaran	Tahun 2020					Jumlah sasaran	Tahun 2021				
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting
1	8.534	635	1.566	6.315	18	25,79%	8.992	342	1.268	7.342	10	17,90%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan Tabel diatas tren *prevalensi stunting* Kabupaten Balangan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu terjadi penurunan 7,89% atau dari 25,79% ditahun 2020 menjadi 17,90% ditahun 2021 dengan sasaran Balita sebanyak 8.992 orang. Stunting tahun 2021 berjumlah 1.610 Balita yang terdiri atas 342 Balita sangat pendek dan 1.268 Balita pendek atau terjadi pengurangan sebesar 590 Balita stunting dibanding tahun 2020 dan terjadi peningkatan Balita normal dari 6.315 orang menjadi 7.342 orang.

Gambar 2.18
Prevalensi Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Balangan



Gambar 2. 18 Prevalensi Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Balangan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Lampihong sebesar 26,50% dan yang terendah di wilayah kerja Puskesmas Paringin sebesar 8,08%. Terjadi penurunan *prevalensi stunting* yang signifikan di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 tentunya tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu dengan berkomitmen untuk mengurangi *prevalensi stunting* melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Balangan dengan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/492/Kum Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 dan Pada tahun 2020 kembali Tim KP2S Kabupaten Balangan membentuk Tim Percepatan Penanganan *Stunting* dengan SK No 188.45/325/Kum Tahun 2020 dan SK No 188.45/343/Kum Tahun 2021.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan baik dari intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan sebesar 30% dan 70% intervensi gizi sensitif oleh Dinas lainnya yang terkait. Anggaran untuk penanganan *stunting* tahun 2022 dari seluruh SKPD terkait penanganan *stunting* baik dari anggaran APBD II dan DAK Rp 3.408.559.000,- dan anggaran dari dana desa Rp 4.279.245.735,- dengan total keseluruhan Rp 4.762.002.835,-. Intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sasaran antara lain remaja putri, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan Balita. Intervensi gizi spesifik yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menurunkan *prevalensi stunting* antara lain dengan mengatasi kekurangan zat besi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan anemia melalui pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil sehingga nutrisi terhadap zat besi dapat terpenuhi, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri untuk mencegah anemia. Terus mendorong inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan kepada ibu masa menyusui. Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk bayi untuk mencegah menderita penyakit berat seperti TBC, polio, campak, hepatitis, defteri dan tetanus. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada Balita di bulan februari dan agustus yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak sehingga tidak mudah sakit yang pada akhirnya secara tidak langsung karena anak sering sakit dapat menyebabkan kekurangan gizi. Selain itu juga Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Balangan melalui jaringannya memberikan PMT bahan pangan lokal kepada ibu hamil KEK, memberikan MP ASI berupa biskuit selama 90 hari yang mana biskuit tersebut berasal dari kementerian kesehatan, pemberian PMT tersebut dengan harapan dapat merubah status ibu hamil KEK menjadi tidak KEK lagi sehingga tidak melahirkan BBLR maupun prematur yang kedepannya berpotensi *stunting*. Memberikan PMT selama 90 hari kepada Balita yang mengalami gizi kurang dan buruk untuk perbaikan asupan nutrisinya. Kegiatan lain yang di lakukan *surveilans* kasus gizi kurang dan gizi buruk, orientasi pemberian Makan Untuk Bayi dan Anak Balita (PMBA) untuk petugas gizi, pembinaan kader BKB, BKR dan BKL serta pembentukan pendamping keluarga dan intervensi lainnya.

Intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh sektor lain yang terkait seperti Dinas PUPR antara lain pembangunan toilet umum di Desa Tigarun, *Uprating* IPA Desa Lok Tabuan, penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering di Desa Hukai. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak antara lain dengan melatih Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebanyak 40 orang, melatih kader posyandu sebanyak 48 orang, pembinaan Pokjanel Posyandu tingkat kabupaten, rebus *stunting* tingkat desa, pembentukan rumah sehat desa, penyuluhan perkawinan anak, seminar *parenting* pada peringatan hari ibu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh anak, pelayanan konseling puspaga bagi calon penganten serta kegiatan lainnya. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan mensosialisasikan pangan alternatif, mensosialisasikan hatinya PKK, memberikan bantuan demplot serta kegiatan pertanaman dirumah anggota kelompok. Dinas Kominfo dengan memberitakan terkait *stunting* di Kabupaten Balangan melalui media baik cetak maupun elektronik, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor dan rebus *stunting* tingkat Kabupaten yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKUMPIDA) untuk berkomitmen bersama menurunkan *stunting* di Kabupaten Balangan dengan berbagai kesepakatan.

Walaupun terjadi penurunan signifikan *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 namun masih belum sesuai dengan harapan Nasional sebesar 14%, sehubungan hal tersebut maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Tim KP2S Kabupaten Balangan lebih serius lagi untuk menanganinya dengan memfokuskan anggaran untuk penanganan *stunting* dan terus mengimplementasikan 8 aksi konvergensi/integrasi penurunan *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan sehingga selaras pencapaiannya dengan target Nasional sebesar 14%.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Sebagai upaya tindak lanjut dari latar belakang kondisi kemiskinan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif, Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya termasuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan kedalam Arah Kebijakan Umum APBD pada tahun 2021-2026. Ada tiga hipotesis yang dapat dirumuskan, pertama: bahwa terjadinya pengurangan kemiskinan hanya bergantung dari upaya Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan penanggulangan kemiskinan pada arah kebijakan pembangunan daerahnya, kedua: upaya yang dilakukan tidak tepat sasaran/tidak relevan dengan kondisi kemiskinan masyarakat, dan ketiga: upaya yang dilakukan hanya mengangkat kemiskinan dalam jangka pendek (cash programme) oleh karena tidak memberdayakan fakir miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan secara mandiri.

3.1. Pembentukan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Balangan telah membentuk lembaga khusus yang berfokus pada penanganan kemiskinan di wilayahnya yang bertugas memfasilitasi penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berhasil guna.

Hal ini kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/751/Kum Tahun 2021

TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, pihak dunia usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Balangan merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Bupati Balangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TKPK menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan ;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Adapun tujuan dari keberadaan lembaga khusus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan penanggulangan kemiskinan;

2. Mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
3. Membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan terpadu, profesional dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya-upaya kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
6. Mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya TKPK Kabupaten Balangan membentuk Dua Kelompok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu: 1) Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu; 2) Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

Tujuan umum penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang di Kabupaten Balangan adalah melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat miskin secara bertahap serta memandirikan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan.

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan adalah:

- 1) Keberpihakan;
- 2) Partisipatif;
- 3) Berwawasan Gender;
- 4) Keberlanjutan;
- 5) Pemberdayaan;
- 6) Meningkatkan Produktivitas;
- 7) Kebersamaan;
- 8) Keterbukaan;
- 9) Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 10) Sinergitas/Keterpaduan.

3.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dua arah rencana kebijakan yang dianggap strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Dalam rangka penggunaan analisis isi, kebijakan dalam RPJMD akan dijadikan sasaran dalam melihat indikator-indikator apa saja yang akan dijadikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan pada periode tahun 2022-2026. Hasil dari analisis isi, diketahui bahwa indikator-indikator penanggulangan kemiskinan yang terpilih meliputi beberapa kebijakan pembangunan yang terdiri dari urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Kependudukan;
- f. Sosial;
- g. Koperasi dan UKM;
- h. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. Perikanan;
- j. Ketenaga Kerjaan;

3.3. Keterpaduan Antar Program/Kegiatan

Pada umumnya seluruh program/kegiatan saling terpadu dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun jika dilihat dari jenis sasarannya, program/kegiatan ini dapat dikelompokkan sebagai kegiatan yang sasarannya langsung kepada masyarakat miskin dan kegiatan yang sasarannya tidak langsung kepada masyarakat miskin. Beberapa kegiatan yang sasarannya langsung kepada masyarakat miskin misalnya adalah Beasiswa bagi Siswa Putus Sekolah, Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil, kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan bagi PMKS, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang sasarannya tidak langsung kepada masyarakat miskin misalnya: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Revitalisasi Posyandu, Pengembangan, Pengembangan Agro Industri Pedesaan, Bantuan Tanggap Darurat Bencana, Pembinaan Keluarga Berencana, dan lain-lain.

Adanya penyertaan dua jenis kegiatan ini sebagai wujud implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kebutuhan langkah strategis dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai sebuah pekerjaan sistem, dimana untuk mengentaskan kemiskinan perlu dipertimbangkan juga aspek-aspek yang mempengaruhi kemiskinan.

Upaya mencapai keberhasilan suatu kegiatan juga didukung pula oleh langkah koordinatif dari masing-masing PD dalam mencapai tujuan kegiatan. Langkah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan penunjang atau pendampingan terhadap suatu kegiatan inti yang menjadi

fokus utama. Beberapa fokus kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan alokasi beragam sumber dana diantaranya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, Desa Siaga, Pelatihan dan Pembentukan KUBE PMKS, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

3.4. Harmonisasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Pusat

Jika melihat sebaran dan proporsi jumlah implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD cukup banyak berperan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Balangan. Hal ini terlihat pula dari sebaran kegiatan APBN yang mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan. Ini membuktikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat bersinergi dengan baik terhadap program penanggulangan kemiskinan daerah, khususnya di Kabupaten Balangan.

Program/kegiatan yang bersumber dana APBN murni ataupun APBN melalui dana dekonsentrasi ke Propinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya juga terdiri dari program/kegiatan yang sasarannya langsung dan yang tidak langsung kepada masyarakat miskin. Selaras dengan Kelompok Program Penanggulangan Nasional maka kondisi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dana APBN dan termasuk dalam Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial adalah: Bantuan Siswa Miskin, BOS, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Bantuan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, Program Keluarga Harapan (PKH),. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Kemandirian Masyarakat.

Jika dilihat dari aspek program/kegiatan berdasarkan sasaran yang langsung kepada masyarakat miskin, maka implementasinya lebih banyak yang tergolong dalam Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program/kegiatan bersumber dana APBN yang termasuk dalam Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran langsung masyarakat miskin hanyalah PKH-KUBE. Dengan demikian upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Balangan umumnya masih dalam bentuk memberikan bantuan langsung tunai (cash programme) dan bukan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan melihat adanya tipe kemiskinan masyarakat Kabupaten Balangan yang tergolong kemiskinan kultural, memberikan bantuan cash programme hanya akan menambah sasaran penduduk miskin menjadi semakin malas dan tidak akan keluar dari kemiskinan.

Dengan demikian apabila disinergikan antara program pusat yang diluncurkan dengan kendala yang dihadapi di Kabupaten Balangan maka permasalahan kemiskinan semakin rumit diatasi. Agar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat, jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan program/kegiatan yang memberdayakan fakir miskin secara langsung dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan. Kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan sasaran utamanya memberdayakan fakir miskin hanya terdapat pada kegiatankegiatan seperti pelatihan keterampilan bagi PMKS (sumber dana APBD), Dengan demikian mengembangkan program ini sangat berpotensi mengurangi

kemiskinan karena sasarannya adalah langsung memberdayakan rumah tangga miskin dan di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat serta perguliran usaha sehingga keberhasilannya dapat ditularkan untuk mengentaskan fakir miskin lainnya.

BAB IV

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Upaya penanggulangan dan pencegahan kemiskinan di Kabupaten Balangan tertuang dalam visi misi Bupati terpilih tahun 2022-2026, berikut merupakan visi misi Bupati Kabupaten Balangan terpilih tahun 2022-2026

Visi

“Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Misi

Meningkatkan dan mengembangkan infrastuktur perdesaan dan perkotaan;

Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan yang berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;

Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;

Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Pada Visi misi Bupati, utamanya pada misi lima sebagai komando arah bagaimana perencanaan pembangunan pada focus social diterjemahkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara eksplisit mengerucut pada amanat penanggulangan kemiskinan, yaitu pada kemanfaatan (beneficiaries) targetnya adalah kelompok yang masuk pada kriteria rumah tangga/individu miskin sebagai berikut:

1. mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro;
2. penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, terutama bagi penduduk miskin;
3. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi, terutama penduduk miskin;
4. meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;
5. penyusunan regulasi daerah supaya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, termasuk pangan dan rumah layak huni yang mendukung pada upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. menuntaskan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
7. Penataan Rumah Layak Huni permukiman kumuh; dan
8. Sasaran pembangunan jangka menengah yang bermuatan arah pembangunan berpihak pada kelompok miskin tersebut menjadi payung pengembangan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Balangan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Balangan pada dasarnya dikembangkan dalam strategi utama pemberdayaan masyarakat. Penggunaan pendekatan charity, yaitu tindakan bantuan langsung kepada masyarakat yang dilakukan dalam kerangka membangun kapasitas masyarakat supaya lebih memiliki kemampuan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Strategi umum penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Di Kabupaten Di Kabupaten Balangan, strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dikontekstualisasikan dengan pendekatan yang dijiwai oleh prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu perpaduan antara teknokratis, top down, bottom up dan partisipasi masyarakat

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan strategi penanggulangan kemiskinan diawali dengan langkah:

- a. Pemetaan masalah kemiskinan, identifikasi jumlah rumah tangga/penduduk miskin;
- b. Merumuskan kriteria program dan kegiatan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan;
- c. Merumuskan sasaran dan target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

Peran dan Fungsi TKPKD

Pembentukan TKPKD tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- e. pengendalian evaluasi pelaksana program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- g. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang terdiri dari: (i) Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu (ii) Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kelompok Program bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi Komite Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh Sekretariat. Peran dan tugas sekretariat ini adalah membantu dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pencapaian tujuan, dan memberikan masukan penyempurnaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta melakukan koordinasi pemberian informasi, diseminasi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergitas semua komponen pilar governance, yaitu: (i) pemerintah, (ii) pelaku usaha/bisnis, dan (iii) masyarakat sipil

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dimana Strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilandasi oleh prinsip sinergis dan integratif. Artinya, kerja sama diantara para pelaku dan diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang rutin, menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem monev RPJM, RKPD serta adanya Sinergitas Antarpelaku dalam Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB V

PENUTUP

Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan kewajiban semua pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat sebagai akademisi. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah sehingga rencana aksi ini merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten Balangan 2021-2026

RAD Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi prioritas wilayah dan mengidentifikasi prioritas penerima manfaat.

Lampiran 1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022-2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB
			2022		2023		2024		2025		2026		
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1	Rp 413.725.000	81%	Rp 434.411.250	84%	Rp 477.852.375	87%	Rp 525.637.613	90%	Rp 578.201.374	DSP3APMD
a	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan sosial	110 KK	Rp 31.590.000	120 KK	Rp 33.169.500	130 KK	Rp 36.486.450	140 KK	Rp 40.135.095	160 KK	Rp 44.148.605	DSP3APMD
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	1 lokasi	Rp 22.000.000	1 Lokasi	Rp 23.100.000	1 Lokasi	Rp 25.410.000	1 Lokasi	Rp 27.951.000	1 Lokasi	Rp 30.746.100	DSP3APMD
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	70	Rp 9.590.000	80	Rp 10.069.500	90	Rp 11.076.450	100	Rp 12.184.095	120	Rp 13.402.505	DSP3APMD
b	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	2 Buah	Rp 5.485.000	2 Buah	Rp 5.759.250	2 Buah	Rp 6.335.175	2 Buah	Rp 6.968.693	2 Buah	Rp 7.665.562	DSP3APMD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	2 Kali	Rp 5.485.000	2 kali	Rp 5.759.250	2 kali	Rp 6.335.175	2 kali	Rp 6.968.693	2 kali	Rp 7.665.562	DSP3APMD
c	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6.054	Rp 376.650.000	7056	Rp 395.482.500	6058	Rp 435.030.750	6060	Rp 478.533.825	6062	Rp 526.387.208	DSP3APMD
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40	Rp 52.300.000	40	Rp 54.915.000	40	Rp 60.406.500	40	Rp 66.447.150	40	Rp 73.091.865	DSP3APMD
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	8 TKSK	Rp 79.850.000	8 TKSK	Rp 83.842.500	8 TKSK	Rp 92.226.750	8 TKSK	Rp 101.449.425	8 TKSK	Rp 111.594.368	DSP3APMD
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	9.336	Rp 230.850.000	9336	Rp 242.392.500	9336	Rp 266.631.750	9336	Rp 293.294.925	9336	Rp 322.624.418	DSP3APMD
		Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	3.757		3757		3757		3757		DSP3APMD		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	8	Rp 13.650.000	9	Rp 14.332.500	10	Rp 15.765.750	11	Rp 17.342.325	12	Rp 19.076.558	DSP3APMD
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	1	Rp 500.915.500	100%	Rp 525.961.275	100%	Rp 578.557.403	100%	Rp 636.413.143	100%	Rp 700.054.457	DSP3APMD
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	800	Rp 500.915.500	800	Rp 525.961.275	800	Rp 578.557.403	800	Rp 636.413.143	800	Rp 700.054.457	DSP3APMD
	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	600 Orang	Rp 203.425.000	600 Orang	Rp 213.596.250	600 Orang	Rp 234.955.875	600 Orang	Rp 258.451.463	600 Orang	Rp 284.296.609	DSP3APMD
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	185	Rp 163.660.600	185	Rp 171.843.630	185	Rp 189.027.993	185	Rp 207.930.792	185	Rp 228.723.872	DSP3APMD

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	27	Rp 33.380.000	27	Rp 35.049.000	27	Rp 38.553.900	27	Rp 42.409.290	27	Rp 46.650.219	DSP3APMD
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	10	Rp 2.000.000	10	Rp 2.100.000	10	Rp 2.310.000	10	Rp 2.541.000	10	Rp 2.795.100	DSP3APMD
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20	Rp 98.449.900	20	Rp 103.372.395	20	Rp 113.709.635	20	Rp 125.080.598	20	Rp 137.588.658	DSP3APMD
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	8		8		8		8		DSP3APMD		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	1	Rp 4.412.192.603	69%	Rp 4.632.802.233	71%	Rp 5.096.082.456	73%	Rp 5.605.690.702	75%	Rp 6.166.259.772	DSP3APMD
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12.065	Rp 4.412.192.603	12071	Rp 4.632.802.233	12077	Rp 5.096.082.456	12083	Rp 5.605.690.702	12089	Rp 6.166.259.772	DSP3APMD
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12.000	Rp 168.140.000	12.000	Rp 176.547.000	12.000	Rp 194.201.700	12.000	Rp 213.621.870	12.000	Rp 234.984.057	DSP3APMD
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	1	Rp 4.090.043.003	100%	Rp 4.294.545.153	100%	Rp 4.723.999.668	100%	Rp 5.196.399.635	100%	Rp 5.716.039.599	DSP3APMD
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	2	Rp 154.009.600	4	Rp 161.710.080	5	Rp 177.881.088	6	Rp 195.669.197	8	Rp 215.236.116	DSP3APMD
		Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	2		4		5		6		8		DSP3APMD
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi	0	Rp 1.878.645.100	4%	Rp 7.991.000.000	4%	Rp 8.568.500.000	4%	Rp 9.643.500.000	4%	Rp 8.884.000.000	DPMTSPPTK
1,1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan kluster kompetensi	0	Rp 1.701.975.100	24%	Rp 7.721.000.000	24%	Rp 8.298.500.000	24%	Rp 9.373.500.000	24%	Rp 8.614.000.000	DPMTSPPTK
1.1.a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan kluster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	1 Paket Pelatihan / 16 orang	Rp 321.668.750	19 Paket Pelatihan / 304 orang	Rp 2.906.000.000	19 Paket Pelatihan / 304 orang	Rp 3.145.000.000	19 Paket Pelatihan / 304 orang	Rp 3.197.000.000	25 Paket Pelatihan / 400 orang	Rp 4.485.000.000	DPMTSPPTK
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitas satuan permukiman yang dibangun	0	Rp -	16%	Rp 265.800.000	16%	Rp 292.380.000	16%	Rp 321.618.000	16%	Rp 353.779.800	DPMTSPPTK
2,1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga non Transmigrasi menjadi warga transmigrasi	0	Rp -	20 orang	Rp 265.800.000	20 orang	Rp 292.380.000	20 orang	Rp 321.618.000	20 orang	Rp 353.779.800	DPMTSPPTK
2.1.a	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan	0	Rp -	2 Kali	Rp 50.800.000	2 Kali	Rp 55.880.000	2 Kali	Rp 61.468.000	2 Kali	Rp 67.614.800	DPMTSPPTK
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	0	Rp 226.457.000	19,05%	Rp 215.000.000	19,20%	Rp 215.000.000	19,35%	Rp 215.000.000	19,50%	Rp 832.667.000	DPMTSPPTK
3,1	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi	0,5 ha	Rp 226.457.000	0,5 ha	Rp 215.000.000	0,5 ha	Rp 215.000.000	0,5 ha	Rp 215.000.000	0,5 ha	Rp 832.667.000	DPMTSPPTK
3.1.a	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah frekuensi Kegiatan Penguatan SDM	2 Kali	Rp 50.730.000	2 Kali	Rp 15.000.000	2 Kali	Rp 15.000.000	2 Kali	Rp 15.000.000	2 Kali	Rp 15.000.000	DPMTSPPTK
3.1.b	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	2 Pkt	Rp 175.727.000	2 Pkt	Rp 200.000.000	2 Pkt	Rp 200.000.000	2 Pkt	Rp 200.000.000	2 Pkt	Rp 817.667.000	DPMTSPPTK
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	28	Rp 229.647.600	29	Rp 292.712.310	30	Rp 321.983.541	31	Rp 354.181.895	32	Rp 389.600.085	DKUKMPP

	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Pendataan, Kemitraan dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	6	Rp 229.647.600	6	Rp 292.712.310	6	Rp 321.983.541	6	Rp 354.181.895	6	Rp 389.600.085	DKUKMPP
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terdata	11	Rp 136.943.100	161	Rp 149.459.200	311,417	Rp 164.405.120	461,417	Rp 180.845.632	611,417	Rp 198.930.195	DKUKMPP
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Kemitraan	12	Rp 92.704.500	16	Rp 143.253.110	20	Rp 157.578.421	24	Rp 173.336.263	28	Rp 190.669.889	DKUKMPP
2	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah	0,30	Rp 259.449.850	0,32	Rp 382.724.210	0,34	Rp 420.996.631	0,36	Rp 463.096.294	0,38	Rp 509.405.924	DKUKMPP
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	7	Rp 259.449.850	9	Rp 382.724.210	11	Rp 420.996.631	13	Rp 463.096.294	15	Rp 509.405.924	DKUKMPP
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas teknologi, promosi dan pemasaran	7	Rp 259.449.850	9	Rp 382.724.210	11	Rp 420.996.631	13	Rp 463.096.294	15	Rp 509.405.924	DKUKMPP
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarpras	44,44	Rp 267.066.200	60,00	Rp 253.550.050	70,00	Rp 278.905.100	80,00	Rp 306.795.650	90,00	Rp 337.475.300	DKUKMPP
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar	2	Rp 267.066.200	1	Rp 253.550.050	1	Rp 278.905.100	1	Rp 306.795.650	1	Rp 337.475.300	DKUKMPP
		Jumlah pasar yang dikelola	4		5		6		7		8		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/fasilitas pendukung pasar yang direvitalisasi/dibangun	2	Rp 267.066.200	1	Rp 253.550.050	1	Rp 278.905.100	1	Rp 306.795.650	1	Rp 337.475.300	DKUKMPP
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,80	Rp 40.585.800	7,60	Rp 42.615.100	7,40	Rp 46.876.640	7,00	Rp 51.564.344	6,80	Rp 56.720.818	DKUKMPP
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian, Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	54	Rp 40.585.800	60	Rp 42.615.100	66	Rp 46.876.640	73	Rp 51.564.344	81	Rp 56.720.818	DKUKMPP
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pasar murah	8	Rp 40.585.800	8	Rp 42.615.100	8	Rp 46.876.640	8	Rp 51.564.344	8	Rp 56.720.818	DKUKMPP
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	10	Rp 74.627.300	10	Rp 211.750.000	10	Rp 211.750.000	10	Rp 215.500.000	10	Rp 215.500.000	DKUKMPP
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1	Rp 74.627.300	1	Rp 211.750.000	1	Rp 211.750.000	1	Rp 215.500.000	1	Rp 215.500.000	DKUKMPP
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi penerapan teknologi industri	10	Rp 74.627.300	10	Rp 211.750.000	10	Rp 211.750.000	10	Rp 215.500.000	10	Rp 215.500.000	DKUKMPP
		Jumlah IKM yang dilatih GMP	10		10		10		10		10		
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknik produksi	10		10		10		10		10		
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Produk Industri yang Bersertifikat Halal	7,75	Rp 34.897.200	8,71	Rp 105.750.000	10,10	Rp 105.750.000	11,31	Rp 105.750.000	12,61	Rp 105.750.000	DKUKMPP
	Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rekomendasi penertiban izin usaha industri	3	Rp 34.897.200	3	Rp 105.750.000	3	Rp 105.750.000	3	Rp 105.750.000	3	Rp 105.750.000	DKUKMPP

	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi produk	6	Rp 34.897.200	6	Rp 105.750.000	8	Rp 105.750.000	8	Rp 105.750.000	10	Rp 105.750.000	DKUKMPP
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82	Rp 1.700.000.000	83,27	Rp 4.750.000.000	84,27	Rp 4.750.000.000	85,27	Rp 4.750.000.000	86,27	Rp 5.000.000.000	Dinas PUPRPERKIM
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82	Rp 1.700.000.000	83,27	Rp 4.750.000.000	84,27	Rp 4.750.000.000	85,27	Rp 4.750.000.000	86,27	Rp 4.750.000.000	
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang pipa yang terbangun di kawasan perkotaan	0	Rp -	4.250	Rp 1.250.000.000	4.250	Rp 1.250.000.000	4.250	Rp 1.250.000.000	4.250	Rp 1.250.000.000	
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang pipa yang terbangun di kawasan perdesaan	4.504	Rp 1.700.000.000	4.504	Rp 3.500.000.000	4.504	Rp 3.500.000.000	4.504	Rp 3.500.000.000	4.504	Rp 3.500.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic	93	Rp 1.969.406.000	93,76	Rp 3.240.000.000	94,76	Rp 3.864.000.000	95,76	Rp 3.264.000.000	96,76	Rp 3.290.400.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic	93	Rp 1.969.406.000	93,76	Rp 3.240.000.000	94,76	Rp 3.864.000.000	95,76	Rp 3.264.000.000	96,76	Rp 3.290.400.000	
1	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	140	Rp 1.749.406.000	250	Rp 3.000.000.000	250	Rp 3.000.000.000	250	Rp 3.000.000.000	250	Rp 3.000.000.000	
2	Oprasional dan Pemeliharaan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1	Rp 220.000.000	1,00	Rp 240.000.000	1,00	Rp 864.000.000	1,00	Rp 264.000.000	1,00	Rp 290.400.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Rp 996.515.000	100	Rp 718.185.600	100	Rp 790.004.160	100	Rp 869.004.576	100	Rp 955.905.034	
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	15	Rp 652.896.000	15	Rp 718.185.600	15	Rp 790.004.160	15	Rp 869.004.576	15	Rp 955.905.034	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	10	Rp 343.619.000	10	Rp 377.980.900	10	Rp 415.778.990	10	Rp 457.356.889	10	Rp 503.092.578	
1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	5	Rp 309.277.000	5	Rp 340.204.700	5	Rp 374.225.170	5	Rp 411.647.687	5	Rp 452.812.456	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	78,49	Rp 1.185.724.450	84,78	Rp 1.304.296.895	91,71	Rp 1.434.726.585	98	Rp 1.578.199.243	100	Rp 1.736.019.167	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	2,1	Rp 1.185.724.450	3	Rp 1.304.296.895	3,3	Rp 1.434.726.585	3	Rp 1.578.199.243	0,95	Rp 1.736.019.167	
1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Panjang drainase dibangun	284	Rp 1.185.724.450	284	Rp 1.304.296.895	284	Rp 1.434.726.585	284	Rp 1.578.199.243	284	Rp 1.736.019.167	
		Panjang jalan yang dibangun	269		269		269		269		269		
5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95	Rp 2.267.609.000	95	Rp 2.494.369.900	96	Rp 2.743.806.890	96	Rp 3.018.187.579	97	Rp 3.320.006.337	
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	65	Rp 2.267.609.000	70	Rp 2.494.369.900	75	Rp 2.743.806.890	85	Rp 3.018.187.579	90	Rp 3.320.006.337	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	110	Rp 2.267.609.000	110	Rp 2.494.369.900	110	Rp 2.743.806.890	110	Rp 3.018.187.579	110	Rp 3.320.006.337	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	177/100.000 KH	Rp 11.252.932.422	176/100.000 KH	Rp 11.815.579.043	132/100.000 KH	Rp 12.997.136.947	131/100.000 KH	Rp 14.946.707.490	130/100.000 KH	Rp 17.936.048.987	DKPPKB

		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18	Rp 656.330.000	17	Rp 689.146.500	16	Rp 758.061.150	15	Rp 871.770.323	14	Rp 1.046.124.387	DKPPKB
		Angka Kematian Bayi (AKB)	14	Rp 92.655.000	13	Rp 97.287.750	12	Rp 107.016.525	11	Rp 123.069.004	10	Rp 147.682.805	DKPPKB
		Angka Kesakitan	0	Rp 43.562.958.278	28%	Rp 45.741.106.109	27%	Rp 50.315.216.220	26%	Rp 57.862.499.333	25	Rp 69.434.998.244	DKPPKB
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM bidang Kesehatan	1	Rp 51.326.600.056	100%	Rp 53.892.930.059	100%	Rp 59.282.223.065	100%	Rp 68.174.556.525	100%	Rp 81.809.467.829	DKPPKB
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Pelayanan Sunatan Massal	120 Orang	Rp 245.961.500	125 Orang	Rp 258.259.575	138 Orang	Rp 284.085.533	150 Orang	Rp 326.698.362	165 Orang	Rp 392.038.035	DKPPKB
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi peserta JKN-KIS	1	Rp 27.960.439.600	100%	Rp 29.358.461.580	100%	Rp 32.294.307.738	100%	Rp 37.138.453.899	100%	Rp 44.566.144.678	DKPPKB
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	0	Rp 2.423.170.337	0,102	Rp 2.529.328.853	0,102	Rp 2.752.261.739	0,102	Rp 2.997.487.913	0,102	Rp 3.267.236.704	DKP3
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	18,7	Rp 2.423.170.337	18,7	Rp 2.529.328.853	18,7	Rp 2.752.261.739	18,7	Rp 2.997.487.913	18,7	Rp 3.267.236.704	DKP3
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan prasarana Budidaya Perikanan yang diberikan (kelompok)	4	Rp 2.423.170.337	4	Rp 2.529.328.853	4	Rp 2.752.261.739	4	Rp 2.997.487.913	4	Rp 3.267.236.704	DKP3
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Konsumsi Ikan	46	Rp 231.068.871	46,5	Rp 242.622.314	47	Rp 266.884.546	47,5	Rp 293.573.000	48	Rp 322.930.300	DKP3
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	1	Rp 53.000.000	1	Rp 56.650.000	1	Rp 62.315.000	1	Rp 68.546.500	1	Rp 75.401.150	DKP3
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	1	Rp 53.000.000	1	Rp 56.650.000	1	Rp 62.315.000	1	Rp 68.546.500	1	Rp 75.401.150	DKP3
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	0	Rp 149.990.000	0,1	Rp 152.989.800	0,1	Rp 156.049.600	0,1	Rp 159.170.600	0,1	Rp 162.354.012	DKP3
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumasan penyediaan infrastruktur sumber daya pendukung ketahanan pangan	9	Rp 149.990.000	9	Rp 152.989.800	9	Rp 156.049.600	9	Rp 159.170.600	9	Rp 162.354.012	DKP3
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah Sarana pendukung kemandirian pangan (Paket)	2	Rp 149.990.000	2	Rp 152.989.800	2	Rp 156.049.600	2	Rp 159.170.600	2	Rp 162.354.012	DKP3
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	0	Rp 14.473.089.900	0,14	Rp 15.196.744.395	0,16	Rp 15.956.581.615	0,18	Rp 17.649.848.782	0,2	Rp 17.367.323.117	DKP3
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	0		0,17		0,18		0,19		0,2		DKP3
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	0		0,17		0,18		0,19		0,2		DKP3
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	1		0,52		0,53		0,54		0,55		DKP3
		Persentase Peningkatan Produksi Daging	0		0,035		0,035		0,035		0,035		DKP3
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Indeks Pertanaman	225 Ha	Rp 8.704.841.000	250 Ha	Rp 8.877.583.050	275 Ha	Rp 9.334.587.203	300 Ha	Rp 10.365.654.929	325 Ha	Rp 9.354.709.879	DKP3
		Jumlah Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Pada Indeks Pertanaman	125 Ha		125 Ha		125 Ha		125 Ha		125 Ha		DKP3
		Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		DKP3

		Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	75 Ha		75 Ha		75 Ha		75 Ha		75 Ha		DKP3
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peningkatan Indeks Pertanaman	100 Ha	Rp 8.704.841.000	100 Ha	Rp 8.877.583.050	100 Ha	Rp 9.334.587.203	100 Ha	Rp 10.365.654.929	100 Ha	Rp 9.354.709.879	DKP3
		Jumlah Penggunaan pupuk berimbang Tanaman Pangan	60 Ha		65		70		75		80		DKP3
		Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		DKP3
		Jumlah Luas Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	75 Ha		75 Ha		75 Ha		75 Ha		75 Ha		DKP3
		Jumlah Asap Cair u/ Pembeku / Penggumpal Lateks	10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		DKP3
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)	100 orang	Rp 767.948.000	160 orang	Rp 1.068.845.400	160 orang	Rp 1.109.162.670	160 orang	Rp 1.220.078.937	160 orang	Rp 1.342.086.831	DKP3
		Jumlah Pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)	100 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		DKP3
		Jumlah Pameran Produk unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		DKP3
		Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti			10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		DKP3
		Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara	12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha		DKP3
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kebun Koleksi dan Entrys yang terpelihara	12 Ha	Rp 91.951.900	12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha		DKP3
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti			10 kegiatan	Rp 262.500.000	10 kegiatan	Rp 262.500.000	10 kegiatan	Rp 288.750.000	10 kegiatan	Rp 317.625.000	DKP3
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Promosi produk unggulan	4 produk	Rp 767.948.000	4 produk	Rp 806.345.400	4 produk	Rp 846.662.670	4 produk	Rp 931.328.937	4 produk	Rp 1.024.461.831	DKP3
		Pelatihan pengolahan chip porang	11		11		11		11		11		DKP3
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebaran Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat	5.330	Rp 5.000.300.900	5773	Rp 5.250.315.945	5900	Rp 5.512.831.742	6100	Rp 6.064.114.916	6300	Rp 6.670.526.408	DKP3
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Ternak Besar Yang didistribusikan	200	Rp 5.000.300.900	200	Rp 5.250.315.945	200	Rp 5.512.831.742	200	Rp 6.064.114.916	200	Rp 6.670.526.408	DKP3
		Jumlah Ternak Kecil Yang didistribusikan	200		200		200		200		200		DKP3
		Jumlah Ternak Unggas Yang didistribusikan	4.430		4873		5000		5200		5400		DKP3
		Jumlah Aneka Ternak yang didistribusikan	500		500		500		500		500		DKP3
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	0	Rp 243.970.390	0,1	Rp 249.408.305	0,1	Rp 255.118.115	0,1	Rp 267.108.716	0,1	Rp 280.298.378	DKP3
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan yang Dibina	16 Kegiatan	Rp 243.970.390	15 Kegiatan	Rp 249.408.305	15 Kegiatan	Rp 255.118.115	15 Kegiatan	Rp 267.108.716	15 Kegiatan	Rp 280.298.378	DKP3
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pameran peternakan yang diikuti	2	Rp 135.212.100	2	Rp 135.212.100	2	Rp 135.212.100	2	Rp 135.212.100	2	Rp 135.212.100	DKP3
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	5 KWT	Rp 108.758.290	5 KWT	Rp 114.196.205	5 KWT	Rp 119.906.015	5 KWT	Rp 131.896.616	5 KWT	Rp 145.086.278	DKP3
		Jumlah Kegiatan Pasar Murah	7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		DKP3

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	85,85%	15.003.830.000	86,45%	3.475.000.000	87,05%	3.610.000.000	87,65%	3.625.000.000	88,25%	6.135.000.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	67,65%	8.511.000.000	68,75%	4.301.000.000	69,85%	4.436.000.000	70,95%	4.451.000.000	72,05%	4.961.000.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah siswa/sekolah yang mendapatkan bantuan biaya BOP PAUD	6.420	8.511.000.000	6.500	4.121.000.000	6.700	4.241.000.000	7.000	4.241.000.000	7.300	4.721.000.000	Dinas Pendidikan
Penyediaan biaya personilpeserta didik paud	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima bantuan biaya	274	-	300	180.000.000	325	195.000.000	350	210.000.000	400	240.000.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	91,59%	581.500.000	93,09%	324.000.000	94,59%	324.000.000	96,09%	324.000.000	97,59%	324.000.000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan biaya sekolah/beasiswa	648	581.500.000	648	324.000.000	648	324.000.000	648	324.000.000	648	324.000.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	74,56%	5.911.350.000	76,26%	850.000.000	77,96%	850.000.000	79,66%	850.000.000	81,36%	850.000.000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah siswa SMP yang menerima bantuan beasiswa pendidikan	750	5.911.350.000	750	850.000.000	750	850.000.000	750	850.000.000	750	850.000.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan SD/SM dalam pendidikan kesetaraan	81,75%	0	83,45%	0	85,15%	0	86,85%	0	88,55%	0	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima bantuan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pendidikan